

TA. 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022 serta mengakselerasikan dengan rencana pencapaian Tahun 2017-2022.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten di masa yang akan datang, Amin.

Serang

2023

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN



M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Bab I	Pendahulaun	1
Bab II	Perencanaan Kinerja	19
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	39
	A. Akuntabilitas Kinerja	39
	1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	39
	2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	50
	3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengantarget jangka menengah yang terdapat dalam dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	58
	4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	60
	5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya	71
	6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	77
	B. Realisasi Anggaran	110
Bab IV	Penutup	118
Lampiran		
	1. Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Esselon II Tahun 2022	
	2. Pernyataan Reviu LKjIP	
	3. Berita Acara Hasil Evaluasi	



Bab I

Pendahuluan

1.1 Pendahuluan

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari system perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP).

LKIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LKIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berkewajiban menyusun LKIP tahun 2022 selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2022, LKIP ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagai mana telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, capaian kinerja tahun untuk, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.



Gambar 1.1

Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Banten

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah perwujudan dari pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Banten yang dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi Banten. Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Memberikan gambaran perihal kinerja Pemerintah Provinsi Banten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022.
2. Memberikan Pertanggung Jawaban/Akuntabilitas terhadap penyelenggaraan program pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

1.3 Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam



penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya mendukung roda pemerintahannya, pemerintah Provinsi Banten telah membentuk dinas-dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah Banten No. 8 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam melayani masyarakat.

Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan laju pertumbuhan yang tinggi dan dinamika pembangunan semakin kompleks. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten menjadi tantangan yang harus dijawab melalui manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang berkualitas menuju *good governance* mengikuti tahapan proses reformasi birokrasi. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional disertai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus terus diupayakan, sehingga kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah dapat diwujudkan.

1.4 Kedudukan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi Banten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah.



1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Pengembangan Perumahan;
- c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengelolaan Izin Lokasi;
- f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
- j. Penetapan Tanah Ulayat;
- k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- m. Penatagunaan Tanah;
- n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
- o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
- q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
- r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
- s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan



- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.

1.6 Tipe Tugas

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diklasifikasi tipe B. Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Pertanahan dengan beban kerja yang sedang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (satu) sekretariat dengan 1 (satu) sub bagian dan 3 (tiga) bidang.

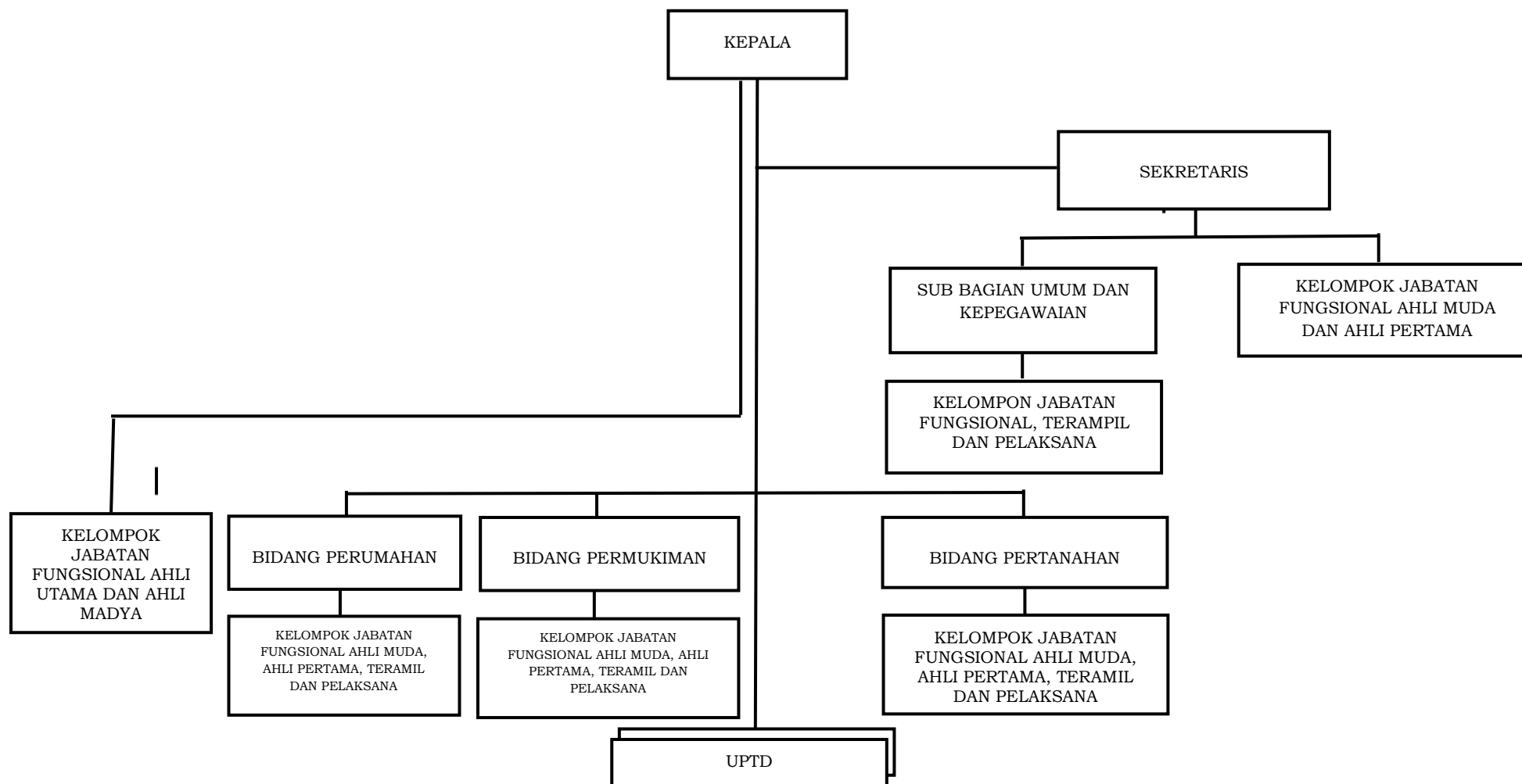
1.7 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan gubernur Provinsi Banten Nomor 48 tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Perumahan;
- d. Kepala Bidang Permukiman;
- e. Kepala Bidang Pertanahan;
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten



1.7.1. Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
 - 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Pengembangan Perumahan;
 - b. Pengembangan Perumahan;
 - c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Pengelolaan Izin Lokasi;



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
 - g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
 - i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
 - j. Penetapan Tanah Ulayat;
 - k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - m. Penatagunaan Tanah;
 - n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
 - o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
 - p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
 - q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
 - r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
 - s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas -117 - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 3) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
- 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
- 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat Daerah;
- 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada dinas;
- 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dinas;
- 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada dinas;
- 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
- 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 15) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
- 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
 - e. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Menengah.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Bidang Permukiman

- a. Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - c. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Bidang Pertanahan

- a. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi;
 - c. Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi;
 - d. Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN);
 - e. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- g. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
 - k. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - l. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
 - m. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
 - n. Rekomendasi Teknis Membuka Tanah;
 - o. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
 - p. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
 - q. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah;
 - r. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin;
 - s. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Svasta, dan Masyarakat;
 - t. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong;
 - u. Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten;
 - v. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan;
 - w. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil;
 - x. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH); dan
 - y. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.8 Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Sampai dengan Desember 2022, jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 59 Orang. Data pegawai (PNS) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Org)
Sekolah Dasar (SD)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	1
Diploma III	5
Diploma IV	0
Sarjana Strata -1	28
Sarjana Strata -2	25
JUMLAH	59 Orang

Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang kepangkatan/Golongan

Pangkat/ Golongan	Jumlah (Org)
Pembina/ Gol. IV	10
Penata/ Gol. III	48
Pengatur/ Gol. II	1
Juru/ Gol. I	0
JUMLAH	59 Orang

1.9 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang Dihadapi Disperkim

Aspek strategis dan permasalahan utama Disperkim Provinsi Banten yang harus segera ditangani diantaranya sebagai berikut :

1. Masih banyak terdapat Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, apabila dilihat berdasarkan daerah, persentase rumah tangga perkotaan yang tinggal di rumah kumuh lebih rendah dibandingkan dengan yang di perdesaan yaitu sebesar 2.51 persen dibandingkan 5.34 persen. Indikator yang digunakan untuk mengestimasi rumah tangga kumuh mengacu pada definisi permukiman kumuh dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yaitu tidak adanya akses sumber air minum layak, tidak adanya akses sanitasi dasar yang layak, luas minimal lantai hunian per kapita kurang dari atau sama dengan 7 m² dan daya tahan material hunian yang tidak cukup layak. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan permasalahan kemiskinan akibat ketimpangan pembangunan yang tidak merata. Masih terdapat 29,00 persen rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi menggunakan jamban sendiri sebesar 30,20 persen. Sementara itu, terdapat 244,31 ha kawasan kumuh yang belum ditangani di kabupaten/kota di Provinsi Banten
2. Masih belum memadainya penyediaan rumah dan kualitas perumahan, dimana baru 85,79 persen rumah tangga yang memiliki tempat tinggal dengan status milik sendiri. Sebanyak 37,23 persen rumah tangga menghuni tempat tinggal dengan luas lantai < 50 m²
3. Masih terbatasnya pelayanan air bersih bagi rumah tangga, dimana pelayanan air bersih melalui perpipaan baru menjangkau kawasan perkotaan dengan kapasitas 176.890 sambungan, atau sekitar 7,72 persen rumah tangga hingga tahun 2008. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, sumber air minum layak adalah sumber air berkualitas meliputi air kemasan, air leding, air hujan, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak lebih dari atau sama dengan 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Hingga tahun 2018, akses terhadap air minum layak di Banten mengalami peningkatan dari 67.47 persen (2016) meningkat menjadi 72.83 persen (2018).

4. Masih kurang optimalnya penanganan air limbah domestik (Rumah tangga) regional. Kondisi sanitasi merupakan salah satu komponen yang ikut mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan yang secara tidak langsung juga turut berkontribusi terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Sanitasi yang layak merupakan syarat mutlak dalam kehidupan sehari-hari untuk tercapainya kesejahteraan, terutama sanitasi yang layak di lingkungan rumah. Mengacu pada definisi indikator sanitasi layak yang ditetapkan dalam SDG's, sanitasi dasar yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi adalah rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, kloset leher angsa, dan tangki septic pembuangan akhir kotoran
5. Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategi daerah provinsi
6. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategi provinsi serta lintas daerah kabupaten kota
7. Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman

1.10 Sistematika Penulisan

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Ini berisikan empat bab Utama yang terdiri dari : (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; dan (4) Penutup.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan



Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan.

Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis

Sebuah Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka menengah (*mid-term planning*), yang terdiri atas visi, misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh OPD pada tahun ke-5 (lima) mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan tujuan OPD dimasa yang akan datang.

Dalam periode 2017-2022, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah

**“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan
Iman dan Takwa”**

sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Banten lebih sejahtera.

2.1.2 Visi Dan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022.

Visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022. Visi tersebut yaitu :

**“Terwujudnya Infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan
keciptakaryaannya yang handal dalam mendukung Banten yang maju, mandiri,
berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah”**

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2022, dimana infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari infrastruktur permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang permukiman yang penjabarannya meliputi:

1. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
2. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
3. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
4. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
5. Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Banten yang masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2017 – 2022, yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua.
2. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

2.1.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional

adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;
2. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;
3. Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana
4. Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara;
6. Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
8. Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak;
10. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD;
11. Menyediakan dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
12. Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten

2.1.4 Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebijakan Umum bidang perumahan, permukiman dan cipta karya sebagai rumusan dari strategi antara lain:

1. Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik
2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
3. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.
4. Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman
5. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, penataan kawasan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.
6. Terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara
 7. Meningkatnya kinerja aparatur
 8. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
 9. Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas
 10. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
 11. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD;
 12. Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Banten

Hubungan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1 Hubungan Keterkaitan antara Visi, Msi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH			
MISI I : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur, serta mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan
MISI II : Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan antar pembangunan daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis,	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	1) Membangun infrastruktur dasar permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis, Kawasan	1) Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan dan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana		Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana;	Kawasan Rawan Bencana;
		2) Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) regional;	2) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3;
		3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan yang sehat;	3) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
		4) Membangun TPST Regional	4) Pembangunan TPST Regional pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3
	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas.	Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Gedung dan Kawasan Strategis Provinsi pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3	Peningkatan pengelolaan dan pembangunan sarana prasarana gedung dan kawasan strategis provinsi pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3.

2.1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten periode Tahun 2017-2022 pada tahun 2022 berdasarkan program dan Kegiatan antara lain sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emes teran SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan/Material
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Laporan Pemeliharaan Mebel
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	Jumlah dokumen Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau	Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

				Terkena Relokasi Program Provinsi	Terkena Relokasi Program Provinsi
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
				Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
				Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
	3	Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
				Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
				Penyusunan/Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Kegiatan Penyusunan/Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Unit Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah hektar Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

					dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Unit Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
				Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
5	Program Pengeleolaan dan Pengmebangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah ltr/dtk Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
				Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota
				Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM
6	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Jiwa Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		regional lintas kabupaten/kota		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
				Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
				Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
				Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

2.1.6 PENETAPAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan sumber daya yang tersedia. Penetapan target kinerja pada tahun anggaran 2022 ini tidak terlepas dari pencapaian outcome atau kinerja Dinas pada tahun sebelumnya sehingga terus berkesinambungan. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022. Adapun target kinerja yang telah diperjanjikan seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tabel 2.2 Indikator Misi Kegiatan di Lingkungan Disperkim Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Membangun kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dalam bidang perumahan rakyat dan permukiman.		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
			Capian Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	A	A
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	B	BB	BB	A	A
2	Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis,kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.		Capian kinerja infrastruktur daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Penyediaan Infrastruktur	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	60%	70%	80%	85%	90%
			Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	114,6 Ha	203,2 Ha	274,6 Ha	333,3 Ha	375,29 Ha
		Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional.	Persentase Rumah Layak Huni	84,02%	85,18%	86,34%	87,50%	88,66%
			Cakupan penyediaan pengelolaan sampah		20%	20%	20%	20%
			Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	40%	50%			



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi			75%	88%	100%

2.1.7 Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan Program kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Proinsi Banten Tahun 2022.

Tabel 2.3

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			32.540.329.018
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.993.000.000
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.185.000.000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.000.000
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000.000
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		150.000.000
	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000
	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	90.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.334.359.018



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	453.000.000
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.000.000
	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000
	4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	90.000.000
	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	628.500.000
	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.000.000
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000
	8	Penyediaan Bahan/Material	1.615.859.018
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.554.000.000
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.130.328.000
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	423.672.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.973.000.000
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.973.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.960.661.000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	760.661.000
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		405.000.000
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.000.000
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	162.478.000



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000
	4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000
	5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000
	6	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	130.022.000
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.170.309.000
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.447.309.000
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.100.000.000
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	488.000.000
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			11.718.675.500
Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi (Satuan : %)	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		2.068.675.500
	1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	346.120.000
	2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	344.135.500
	3	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	345.180.000
	4	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	344.440.000
	5	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	344.280.000
	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	344.520.000



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		300.000.000
	1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	300.000.000
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	10.934.426.300
	3	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.150.000.000
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		9.150.000.000
	1	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	634.426.300
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		200.000.000
	1	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	200.000.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			61.349.139.900
Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan : Hektar)	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		2.125.000.000
	1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	700.000.000
	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	300.000.000
	3	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	525.000.000
	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	600.000.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		59.224.139.900
	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	13.245.000.000
	2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	41.966.290.000



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	3	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.365.000.000
	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.647.849.900
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Capaian penyediaan perumahan dan PSU Permukiman (satuan : %)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		513.654.009.500
	1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	470.369.960.000
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	40.832.931.000
	3	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2.451.118.500
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			23.207.007.200
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (Satuan : %)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		23.207.007.200
	1	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	21.611.647.200
	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	650.000.000
	3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM	945.360.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			-
cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (Satuan : %)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		
	1	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	-
	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	-



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		590.000.000
Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (Satuan : %)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	590.000.000
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	50.000.000
	2 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	540.000.000
ROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		381.522.588.407
persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan : %)	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	381.522.588.407
	1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	369.228.482.803
	2 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	12.294.105.604
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		29.625.060.569
persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan : %)	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	29.625.060.569
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.559.779.200
	2 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	654.124.189
	3 Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.349.357.576
	4 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	15.061.799.604

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan masing – masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 – 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja

Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, kendala/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang seperti terlihat pada tabel-tabel berikut ini :



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KINERJA INDIKATOR SASARAN	CAPAIA INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	81,00	74,09	91,48%
2	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Ha)	375,29	391,60	104,35%
3		Persentase Rumah LayakHuni (Satuan: %)	88,66%	76,14%	85,88%
4		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah (Satuan: %)	20,00%	0,00%	0,00%
5	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	100,00%	96,88%	96,88%

Tingkat capaian sasaran meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional mencapai 74,77%, tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yaitu 100% pada tahun 2022. Untuk mencapai target ini, harus memenuhi 3 indikator sasaran yaitu indikator Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani, indikator Persentase Rumah Layak Huni serta indikator cakupan penyediaan pengelolaan sampah. Hal tersebut diakrenakan terdapat indikator dengan capaian 0% yaitu indikator Cakupan pelayanan pengelolaan sampah. Namun terdapat indikator yang melebihi 100% yaitu indikator Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani, hal tersebut dikarenakan target renstra sampai dengan tahun 2022 yaitu 375,29 Ha sedangkan target hasil kesepakatan dengan Kabupaten/Kota dan Pusat yaitu 403,27 Ha.

Keberhasilan dalam pemenuhan penilaian indikator kinerja ini disebabkan faktor adanya :

1. Adanya komunikasi yang jelas dan konsisten
2. Sikap kejujuran, komitmen dan demokrasi
3. Telah tersusunnya data perencanaan yang baik sebagai dasar pelaksanaan fisik
4. Telah terbentuknya tim teknis, tim verifikasi dan tim pendampingan sebagai pendukung pelaksana kegiatan

Selain dari faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian kinerja, yakni :

1. Struktur Organisasi yang belum sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi serta belum sesuai dengan Tupoksi
2. Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian
3. Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan
4. Penyesuaian aktifitas dalam menghadapi Pandemi Covid-19

Namun demikian jika dilihat dari capaian program dan kegiatan yang menunjang pada capaian target kinerja sasaran tersebut, menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Penjelasan terkait kondisi tersebut akan diuraikan kemudian melalui analisis penyebab peningkatan dan penurunan capaian kinerja pada sub bab berikutnya dalam dokumen ini. Capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tabel 3.2

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SATUAN	KINERJA OUTPUT		
						KINERJA OUTPUT	REALISASI OUTPUT	CAPAIAN (%)
Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD				Nilai	81,00	74,09	91,48
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		32.540.329.018	Persen	100	91,48	91,48
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.993.000.000	Dokumen	100	100	100
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.185.000.000	Dokumen	13	13	100
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000	Dokumen	20	20	100
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000	Dokumen	20	20	100
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000	Dokumen	20	20	100
			5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.000.000	Dokumen	20	20	100
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000.000	Laporan	11	11	100
			7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000	Dokumen	3	3	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000	Dokumen	100	100	100
			1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000	Dokumen	1	1	100
			2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	90.000.000	Dokumen	2	2	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.334.359.018	Dokumen	100	100	100



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	453.000.000	Bulan	1	1	100
			2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.000.000	Tahun Anggaran	1	1	100
			3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	90.000.000	Bulan	1	10	1000
			4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	90.000.000	Kegiatan	1	1	100
			5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	628.500.000	Tahun Anggaran	1	1	100
			6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.000.000	Dokumen	1	1	100
			7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	Tahun Anggaran	1	1	100
			8	Penyediaan Bahan/Material	1.615.859.018	Paket	1	1	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.554.000.000	Laporan	23	19	82,61
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.130.328.000	Unit	4	3	75
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	423.672.000	Unit	19	16	84,21
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.973.000.000	Laporan	12	12	100,00
			1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.973.000.000	Bulan	12	12	100,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.960.661.000	Laporan	4	4	100,00
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	Unit	17	17	100,00
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	760.661.000	Unit	48	48	100
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000	Unit	288	273	94,79
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	Gedung	1	1	100
			5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	Gedung	1	1	100



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	405.000.000	Dokumen	100	83,33	83,33
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.000.000	Dokumen	57	57	100
			2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	162.478.000	Stel	2	2	100
			3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000	Dokumen	4	4	100
			4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000	Dokumen	1	0	100
			5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	Dokumen	1	1	100
			6 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	130.022.000	Dokumen	3	3	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.170.309.000	Laporan	20	20	100
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.447.309.000	Bulan	14	14	100
			2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.100.000.000	Bulan	12	12	100
			3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	488.000.000	Dokumen	3	3	100
			4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	Dokumen	1	1	100
			5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	Dokumen	1	1	100
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	100.000.000	Dokumen	1	1	100
			7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	Dokumen	1	1	100



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Persentase Rumah Layak Huni				Persen	88,66	76,14	85,88
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		11.718.675.500		88,66	33,27	37,53
		Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi (Satuan : %)	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.068.675.500	Dokumen	100	100	100
			1 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	346.120.000	Dokumen	3	3	100
			2 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	344.135.500	Dokumen	3	3	100
			3 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	345.180.000	Dokumen	3	3	100
			4 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	344.440.000	Dokumen	3	3	100
			5 Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	344.280.000	Dokumen	3	3	100
			6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	344.520.000	Dokumen	3	3	100
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000	Kegiatan	1	1	100
			1 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	300.000.000	Dokumen	1	1	100
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	9.150.000.000	Unit	106	49	46,23



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

			1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	10.934.426.300	Unit	91	34	37,36
			2	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.150.000.000	Unit	15	15	100
			3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	634.426.300	Dokumen	3	3	100
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		200.000.000	Kegiatan	1	1	100
			1	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	200.000.000	Dokumen	1	1	100
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					33,33	33,27	99,82
		Capaian penyediaan perumahan dan PSU Permukiman (satuan : %)		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	513.654.009.500	Unit	2413	103,56	100
			1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	470.369.960.000	Dokumen	2413	2409	99,83
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	40.832.931.000	Kegiatan	1	1	0
			3	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2.451.118.500	Dokumen	5	5	100
	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani					Hektar	375,29	391,6	104,35
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			61.349.139.900		375,29	391,6	104,35
		Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan : Hektar)		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.125.000.000	Kegiatan	4	4	100
			1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	700.000.000	Kegiatan	1	1	100
			2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	300.000.000	Kegiatan	1	1	100



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

			3	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	525.000.000	Kegiatan	1	1	100
			4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	600.000.000	Kegiatan	1	1	100
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		59.224.139.900	Ha	375,79	391,6	104,21
			1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	13.245.000.000	Unit	227	219	96,48
			2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	41.966.290.000	Ha	100,14	100,14	100
			3	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.365.000.000	Dokumen	6	6	100
			4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.647.849.900	Dokumen	29	29,00	100
	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah						20	0	0
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			-	Persen	20	0	0
		cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (Satuan : %)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						
			1	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	-				
			2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	-				



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

			TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi					
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		23.207.007.200	Persen	96,53	91,71	95,01
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (Satuan : %)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	23.207.007.200	ltr/dtk	10	10	100
			1 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	21.611.647.200	Dokumen	3	2	66,67
			2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	650.000.000	Dokumen	1	0,5	50
			3 Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM	945.360.000	ltr/dtk	10	10	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		590.000.000		100	0	0
		Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (Satuan : %)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	590.000.000	Kegiatan	2	2	50
			1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	50.000.000	Dokumen	1	1	100
			2 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	540.000.000	Dokumen	1	1	100
Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi				Persen	100	96,88	96,88
		ROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		381.522.588.407		100	100	100
		persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan : %)	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	381.522.588.407	Kawasan	3	3	100
			1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	369.228.482.803	Kawasan	3	3	100



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

			2	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	12.294.105.604	Kegiatan	1	1	100
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			29.625.060.569		100	93,75	93,75
		persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan : %)		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	29.625.060.569	Kegiatan	4	4	100
			1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.559.779.200	Dokumen	18	18	100
			2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	654.124.189	Dokumen	6	6	100
			3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.349.357.576	Kawasan	5	4	80
			4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	15.061.799.604	Kawasan	2	2	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2022 dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, menunjukkan bahwa terdapat dua capaian indikator kinerja sasaran dan satu indikator kinerja program yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada:

1. Indikator kinerja sasaran capaian SAKIP dan capaian maturitas SPIP;
2. Indikator kinerja program Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penjelasan terkait kondisi tersebut akan diuraikan kemudian melalui analisis penyebab peningkatan dan penurunan capaian kinerja pada sub bab berikutnya dalam dokumen ini. Namun demikian, selain capaian pada indikator kinerja tersebut, capaian indikator kinerja sasaran dan program yang lain secara umum menunjukkan capaian yang meningkat. Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama Tahun 2021 dan Tahun 2022 seperti dilihat pada tabel 3.5 serta perbandingan Pengukuran Kinerja beberapa tahun terakhir seperti dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut:



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tabel 3.5 Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun sebelumnya Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
				2021			2022		
Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD		Nilai	80,00	81,50	101,88	81,00	74,09	91,47
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	82,61	82,61
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100	100	100	83,33	83,33
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Persentase Rumah Layak Huni		Persen	87,5	70,71	80,81	88,66	76,14	85,88
	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani		Hektar	333.33	292.04	93.38	375,29	391,60	104,35
		Program Kawasan Permukiman							
		Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Hektar	333.33	292.04	93.38	375,29	391,6	104,35
	Persentase Rumah Layak Huni		Persen	87,5	70,71	80,81	88,66	76,14	85,88
		Program Pengembangan Perumahan							



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi	Persen	100,00	25,95	25,95	88,66	33,27	37,53
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)							
		Capaian penyediaan perumahan dan PSU Permukiman	Persen	33,33	33,27	99,82	33,33	33,27	99,82
	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah		Persen	15,00	10,00	66,67	20,00	0,00	0,00
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional							
		cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	Persen	20,00	10,00	50,00	100	0,00	0,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum							
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	Persen	88,04	93,51	106,21	96,53	91,71	95,01
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah							
		Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Persen	20,00	10,00	50,00	20,00	0,00	0,00
Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi		Persen	88,00	88,00	100,00	100	100	100
		Program Penataan Bangunan Gedung							
		persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Persen	88,00	88,00	100,00	100	100	100
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan							
		persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Persen	89,00	89,00	100,00	100	93,75	93,75



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tabel 3.6 Perbandingan Pengukuran Kinerja beberapa tahun terakhir Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Indikator Kinerja Sasaran	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				Realisasi				Capaian				Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			2022		
Capaian SAKIP OPD	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Nilai	68,00	75,00	78,00	80,00	0,00	75,64	79,13	81,50	0,00	100,85	101,45	101,88	Capaian SAKIP OPD	Nilai	81,00	74,09	91,48
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	95,785	100	100	100	95,79	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	91,48	91,48
	Terselenggaranya Perencanaan dan Pelaporan Secara Optimal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persen	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persen	100	82,61	82,61
	Meningkatnya Kopetensi Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Persen	100	100	100	100	100	100	98,52	100	100	100	98,52	100	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	83,33	83,33
	Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100	84,62	100	100	100	84,62	100	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100	100
Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani		hektar	114,6	203,2	274,6	333,33	58,22	201	256,41	292,04	50,80	98,85	98,85	93,38		Hektar	375,29	391,60	104,35
	Program Kawasan Permukiman	hektar	114,6	203,2	274,6	333,33	58,22	201	256,41	292,04	50,80	98,85	98,85	93,38	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Hektar	375,29	391,6	104,35



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	Meningkatnya Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani																		
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	hektar	203.20	114.60	N/A	N/A	200.87	58.22	N/A	N/A	98.85	50.80	N/A	N/A	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persen	85.18	84.02	N/A	N/A	93.13	309.50	N/A	N/A	109.33	368.36	N/A	N/A	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Rumah Layak Huni		Persen	84,02	85,18	86,34	87,5	309,5	93,1	73,51	70,71	368,36	109,33	85,14	80,81		Persen	88,66	76,14	85,88
	Program Pengembangan Perumahan	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A	25,78	25,95	N/A	N/A	25,78	25,95	Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi	Persen	88,66	33,27	37,53
	Tersedianya pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan reloaksi korban provinsi																		
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persen	N/A	N/A	33,33	33,33	N/A	N/A	33,33	33,27	N/A	N/A	100,00	99,82	Capaian penyediaan perumahan dan PSU Permukian	Persen	33,33	33,27	99,82
	Meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)																		
Cakupan pelayanan pengelolaan sampah		Persen	N/A	N/A	20,00	15,00	N/A	N/A	5,00	10,00	N/A	N/A	25,00	66,67		Persen	20,00	0,00	0,00
	Program Keciptakaryaan	Persen	76.15	72.75	N/A	N/A	73.68	74.90	N/A	N/A	96.76	102.96	N/A	N/A	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	Persen	N/A	N/A	N/A
		Persen	75.57	72.86	N/A	N/A	79.71	71.09	N/A	N/A	105.48	97.57	N/A	N/A	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	Persen	N/A	N/A	N/A
		Persen	20.00	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	Persen	N/A	N/A	N/A
	Program Keciptakaryaan	Persen	76.15	72.75	N/A	N/A	73.68	74.90	N/A	N/A	96.76	102.96	N/A	N/A	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih	Persen	N/A	N/A	N/A



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	Program Pengembangan Sistem dan Pngelolaan Persampahan Regional	Persen	N/A	N/A	20,00	20,00	N/A	N/A	10,00	10,00	N/A	N/A	50,00	50,00	cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	Persen	100	0,00	0,00
	Meningkatnya sistem dan pengelolaan persampahan regional																		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum	Persen	N/A	N/A	81,24	88,04	N/A	N/A	71,1	93,51	N/A	N/A	87,52	106,21	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (satuan : %)	Persen	96,53	91,71	95,01
	Terkelolanya serta meningkatnya sistem penyediaan air minum																		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persen	N/A	N/A	20,00	20,00	N/A	N/A	10,00	10,00	N/A	N/A	50,00	50,00	Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (satuan : %)	Persen	20,00	0,00	0,00
	Tersedianya sistem penyediaan air limbah domestik regional																		
Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi		Persen	25,00	50,00	75,00	88,00	0,00	39,89	69,91	88,00	0,00	90,67	93,21	100,00		Persen	100	100	100
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persen	25,00	50,00	75,00	88,00	25,00	39,89	69,91	88,00	100,00	79,78	93,21	100,00	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Persen	100	100	100
	Tertatanya bangunan gedung																		
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	28,00	69,00	83,00	89,00	28,22	62,56	83,00	89,00	100,79	90,67	100,00	100,00	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Persen	100	93,75	93,75
	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan																		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pada tabel di atas menunjukkan terdapat perubahan jumlah program dan perbedaan crosscutting antara sasaran kinerja dan program. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, terdapat perubahan nomenklatur program yaitu Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan dan Program Keciptakarya, sedangkan mulai Tahun 2021, dari tiga program tersebut menjadi sembilan program. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. SIPD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah. Adanya peraturan tersebut, berpengaruh besar terhadap nomenklatur perencanaan program dan kegiatan, sehingga diperlukan perubahan untuk memetakan kembali hubungan dan keselarasan antara sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang terdapat pada sistem tersebut. Berdasarkan hasil Pemetaan, terdapat beberapa perubahan yaitu pada nomenklatur program dan indikator kinerjanya, yang awalnya hanya ada 3 program bertambah menjadi 9 dengan nama program yang berbeda dari nama program di tahun sebelumnya, yaitu menjadi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerjanya:
 - a. Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
 - b. Capaian dukungan sarana prasarana adm. perkantoran pada Perangkat Daerah;
 - c. Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - d. Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Program Pengembangan Perumahan, dengan indikator Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi
3. Program Kawasan Permukiman, dengan indikator Luas Kawasan Kumuh yang ditata
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), dengan indikator Capaian penyediaan perumahan dan PSU Permukiman
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 6. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan indikator cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional
- 7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limabah, dengan indikator Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota
- 8. Program Pentataan Bangunan Gedung, dengan indikator persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi
- 9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannnya, dengan indikator persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama dan indikator kinerja program Tahun 2022 telah sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja dengan Tahun ini dengan target Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2022		Target Renstra Tahun 2022
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD		Nilai	81,00	74,09	91,48
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen	100	91,48	100
			Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persen	100	100	100
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persen	100	82,61	100
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	83,33	100



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

			Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Persentase Rumah Layak Huni		Persen	88,66	76,14	88,66
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persen	100	46,23	100
			Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi	Persen	100	46,23	100
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persen	33,33	33,27	33,33
			Capaian penyediaan perumahan dan PSU Permukiman	Persen	33,33	33,27	33,33
		Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani		Hektar	375,29	391,60	375,29
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persen	375,29	391,60	375,29
			Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Hektar	100,14	100,14	100,14
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah		Persen	20	0	0
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persen	20	0	0
			cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	Persen	20	0	0
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persen	96,53	91,71	96,53
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	Persen	96,53	91,71	96,53
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persen	100	0	0
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	Persen	100	0	0
3.	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi		Persen	100	100	100



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

			ROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persen	100	100	100
			persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi	Kawasan	100	100	100
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persen	100	93,75	100
			persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Kegiatan	100	93,75	100

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan tersebut. Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui program, kegiatan dan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selama Tahun 2022.

4.1 Capaian Sasaran 1, Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja

Sasaran ke-1 memiliki indiaktor kinerja utama yaitu capaian SAKIP, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : Nilai 81
Realisasi : Nilai 74,09
Capaian : 91,48 %

Realisasi indikator kinerja sasaran SAKIP dengan nilai 74,09 adalah hasil dari realisasi kinerja atas program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui indiaktor kinerjanya, yaitu :

- a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah, dengan capaian sebesar 100%;
- b. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah, dengan capaian sebesar 82,61%;
- c. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, dengan capaian sebesar 83,33%;



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- d. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, dengan capaian sebesar 100%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 83,33%;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 82,61%;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, yaitu

$$\frac{91,48}{100} \times 100 = 91,48\%$$

- 1. Capaian Indiaktor kinerja program ke 2 yang masih menunjukan persentase dibawah 100% disebabkan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan hanya 2 bulan (perubahan). Adapun sarana prasarana yang direncanakan adalah untuk :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada belanja Modal Personal Computer
 - Laptop 13 INCH 3 unit spekt tidak ada di TKDN.Capaian Kinerja Kegiatan : 23 Unit/19 Unit x 100% = 82,61 %
- 2. Capaian Indikator kinerja program ke-3 yang masih menunjukan persentase dibawah 100% disebabkan mekanisme pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur APBD Provinsi Banten,



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

sehingga tidak dapat melaksanakan pengiriman peserta Pendidikan dan pelatihan.

3. Tahun anggaran selanjutnya akan lebih cermat dalam merencanakan program dan anggaran, sehingga waktu pelaksanaan mencukupi.

4.2 Capaian Sasaran 2, Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional

Sasaran ke-2 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani, Persentase Rumah Layak Huni, Cakupan pelayanan pengelolaan sampah serta Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi.

IKU Pertama yaitu **Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 375,29 Hektar

Realisasi : 391,60 Hektar

Capaian : 104,35%

Realisasi indikator kinerja sasaran Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani dengan capaian kinerja 104,35% adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Kawasan Permukiman dengan indikator kinerjanya Luas Kawasan Kumuh yang ditata, dengan capaian sebesar 104,35% pada tahun 2022.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan oleh 2 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 1. Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh dengan capaian kinerja sebesar 100%
 2. Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan capaian kinerja sebesar 100%
 3. Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dengan capaian kinerja sebesar 100%
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan capaian kinerja sebesar 100%



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan capaian kinerja sebesar 100%
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan capaian kinerja sebesar 100%
 3. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan capaian kinerja sebesar 100%
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan capaian kinerja sebesar 100%

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian program Kawasan permukiman, yaitu :

$$\frac{391,60}{375,29} \times 100 = 104,35\%$$

Dapat dilihat bahwa capaian indikator sasaran Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani hanya memiliki satu indikator kinerja program dengan capaian kinerja dihitung secara akumulasi setiap tahunnya.

KEBERHASILAN pada indikator sasaran tersebut, yaitu:

1. Target kinerja berdasarkan target renstra 2017-2022 luasan kumuh yang ditangani sebesar 375,29 Ha serta hasil kesepakatan bersama Kabupaten/Kota dan Pusat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 luasan kawasan kumuh yang ditangani sebesar 425,41 Ha. Hasil kesepakatan sebesar 425,41 Ha termasuk target renstra 2017-2022 sebesar 375,29 Ha
2. Hasil penanganan oleh Dinas Perkim pada tahun anggaran 2022 sebesar 100,14 Ha melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3. Target kinerja Program Permukiman Kumuh yang mengampu indikator kinerja sasaran yaitu **Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani** sebesar 375,29 Ha. Hasil penanganan Kawasan permukiman kumuh sampai dengan tahun 2022 oleh Provinsi maupun hasil kolaborasi dengan Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 391,60 Ha. Dengan perhitungannya adalah realisasi capaian sampai tahun 2021 sebesar 292,04 Ha, sehingga realisasi sampai tahun 2022 adalah $292,04+100,14=391,60$ Ha.
4. Penangan Kawasan permukiman kumuh ditangani oleh Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Penanganan Kawasan kumuh di Provinsi Banten merupakan hasil kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar penanganan kumuh tertangani lebih baik.
5. Adapun data hasil penanganan Kawasan kumuh selama periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :

KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	KAMPUNG	TARGET RENSTRA	DATA KAWASAN KUMUH HASIL KESEPAKATAN (KEWENANGAN PROVINSI)	JUMLAH HASIL PENANGANAN TAHUN 2022	SAMPAI DENGAN TAHUN 2022	KETERANGAN
KOTA SERANG	KECAMATAN	KELURAHAN		60,12	70,37	18,46	64,99	
KOTA SERANG	SERANG	TERONDOL	Kp. Terondol, Kp. Kubang apu & Kp. Kesewon	13,59	13,59	8,21	8,21	Penangan TA. 2020, berupa penangan fisik : Drainase Lingkungan : U-Ditch 30x30x20 cm + Cover (2.111 M) Sisa yang ditangani tahun 2022 sebesar = 8.21 Ha
KOTA SERANG	TAKTAKAN	TAKTAKAN	Kp. Cigabus Dalam, Kp. Kepandean Got & Cigabus Dalam	10,29	10,29		10,29	Kolaborasi penanganan kawasan kumuh antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang dan KOTAKU tahun 2019
KOTA SERANG	TAKTAKAN	KALANGANY AR	Kp. Perumasan, Kp. Cigabus & Kabadilan	12,09	12,09		12,09	Kolaborasi penanganan kawasan kumuh antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang dan KOTAKU tahun 2019
KOTA SERANG	KASEMEN	WARUNGJAU D	Kp. Sadiyah Satu, Kp. Sadiyah Dua dan Kp. Kisaud	14,04	14,04		14,04	Ditangani oleh Dinas Perkim Prov. Banten Tahun Anggaran 2021
KOTA SERANG	KASEMEN	MARGALUYU	Kp. Margaluyu	10,11	10,11		10,11	Ditangani oleh Dinas Perkim Prov. Banten Tahun Anggaran 2021
KOTA SERANG	CURUG	CURUG MANIS	Link. Kerasikan Masjid, RT 007/RW 002		10,25	10,25	10,25	SK. Walikota Serang No. 663/Kep.293-Huk/2020 tanggal 17 Nov 2020, dan berdasarkan Hasil Kesepakatan tahun 2021 Ditangani oleh Dinas Perkim Prov. Banten Tahun Anggaran 2022
KOTA SERANG	CURUG	CURUG MANIS	Link. Kerasikan Tonjol, RT 008/RW 002					
KOTA SERANG	CURUG	CURUG MANIS	Link. Ciwaktek, RT 016/RW 004					
KOTA CILEGON	7 KECAMATAN	15 KELURAHAN		11,1	23,71	12,61	23,71	0



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA CILEGON	CIBEBER	KARANG ASEM	Link. Jerang Ilir RT. 01, 02, 03 RW. 03	8,1	8,1		8,1	Telah ditangani oleh Dinas Perkim. Prov. Banten Tahun Anggaran 2018
KOTA CILEGON	CIBEBER	KARANG ASEM	Link. Sambiragon, RT. 01, 02, 03 RW. 05	1,7	1,7		1,7	Telah ditangani oleh Dinas Perkim. Prov. Banten Tahun Anggaran 2018
KOTA CILEGON	GROGOL	KEDALEM	Link. Karang Tengah, RT. 01, 02, 03, 04 RW. 04	1,3	1,3		1,3	Telah ditangani oleh Dinas Perkim. Prov. Banten Tahun Anggaran 2018
KOTA CILEGON	PULOMERAK	MEKARSARI	Link. Sukajadi, RT. 06 RW. 02		9	9	9	Telah ditangani oleh Dinas Perkim Provinsi Banten tahun anggaran 2022, pada indikator Jalan lingkungan, drainase lingkungan, ruang terbuka publik
KOTA CILEGON	PULOMERAK	MEKARSARI	Link. Gunung Batur, RT. 01, 02, RW. 03		3,61	3,61	3,61	
KABUPATEN SERANG	19 KECAMATAN	64 DESA		10,7	10,7	13,56	24,26	0
KABUPATEN SERANG	KRAGILAN	SUKAJADI	BATUBEULAH			0,56	0,56	Ditangani oleh Dinas Perkim. Provinsi Banten tahun anggaran 2022, berupa penanganan : - Jalan Lingkungan - Drainase Lingkungan
KABUPATEN SERANG	PONTANG	KASERANGAN	KASERANGAN	10,7	10,7		10,7	Telah ditangani oleh Dinas Perkim Provinsi Banten tahun anggaran 2022, pada indikator Jalan lingkungan, drainase lingkungan, ruang terbuka publik
KABUPATEN SERANG	WARINGINKURUNG	SUKABARES	SATIMBAGA			6,5	6,5	Ditangani oleh Dinas Perkim. Prov Banten tahun anggaran 2022, indikator yg ditangani Jalan lingkungan, drainase lingkungan, air bersih
KABUPATEN SERANG	WARINGINKURUNG	SUKABARES	CIKUDA			6,5	6,5	
KABUPATEN LEBAK	3 KECAMATAN	7 DESA		28,97	28,97	14,66	28,97	14,66
KABUPATEN PANDEGLANG	8 KECAMATAN	17 DESA		109,23	120,63	40,85	88,08	8,46
KABUPATEN PANDEGLANG		TANJUNGPAYAYA	CIKADU	12	12		12	Ditangani oleh Dinas Pekrim. Provinsi Banten tahun anggaran 2021
KABUPATEN PANDEGLANG	PANIMBANG	MEKARSARI			11,40	9,16	9,16	SK. Bupati Pandeglang No. 660/Kep.203-Huk/2019 tanggal 10 Mei 2019, dan berdasarkan hasil kesepakatan 2021 Ditangani oleh Dinas Pekrim, Provinsi Banten tahun anggaran 2022, berupa penanganan : - Jalan lingkungan, - drainase - lingkungan, - ruang terbuka hijau - persampahan
KABUPATEN PANDEGLANG	KARANGTANGJUNG	JUHUT	CURUP	14	14		14	Ditangani oleh Dinas Pekrim. Provinsi Banten tahun anggaran 2021
KABUPATEN PANDEGLANG	CARITA	BANJARMASIN		10,37	10,37		10,37	ded 2021
KABUPATEN PANDEGLANG		CARITA		12	12	8,83	8,83	Penangaan TA. 2020, berupa penanganan fisik : Jalan Lingkungan Beton Readymix (406,7 M3) Jalan Lingkungan Paving Block (90,4 M2) Sisa yang ditangani tahun 2022 sebesar = 8.83 Ha
KABUPATEN PANDEGLANG		TELUK		10,86	10,86		10,86	Ditangani oleh KOTAKU
KABUPATEN PANDEGLANG		KALANGANYAR		12	12	12	12	Sudah ditangani oleh Kab. Pandegaling dan KOTAKU
KABUPATEN PANDEGLANG	PAGELARAN	PAGELARAN		12	12			Penyusunan DED dilaksanakan tahun 2023
KABUPATEN PANDEGLANG	CIKEUSIK	CIKERUHWE TAN		12	12			Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan SDH



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

								DITANGANI KOTAKU
KABUPATEN PANDEGLAN G		RANCASENA NG		14	14	10,86	10,86	Penanganan TA. 2020, berupa penanganan fisik : - Jalan Lingkungan Beton Readymix (433,74 M3) - Jalan Lingkungan Paving Block (530,648 M2) - Tembok Penahan Tanah (TPT) (92,61335 M2) Sisa yang ditangani tahun 2022 sebesar = 10.86 Ha
KABUPATEN TANGERANG	25 KECAMATAN	170 DESA		6,30	7,43	0	0	6,30
KABUPATEN TANGERANG	KRONJO	DESA KRONJO	RW 03		0,65			Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan lokasi kawasan kumuh berada pada lokasi wisata religi
KABUPATEN TANGERANG	KRONJO	DESA KRONJO	RW 04		0,48			
KABUPATEN TANGERANG	MAUK	DESA TANJUNG ANOM	RW 01	1,59	1,59			Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan lokasi kawasan kumuh berada pada kawasan industri milik pribadi
KABUPATEN TANGERANG	MAUK	DESA TANJUNG ANOM	RW 02	1,66	1,66			
KABUPATEN TANGERANG	MAUK	DESA TANJUNG ANOM	RW 03	1,00	1,00			
KABUPATEN TANGERANG	MAUK	DESA TANJUNG ANOM	RW 04	1,13	1,13			
KABUPATEN TANGERANG	MAUK	DESA TANJUNG ANOM	RW 05	0,92	0,92			
KOTA TANGERANG SELATAN	7 KECAMATAN	28 KELURAHAN		89,97	114,87	0	102,71	12,00
KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	03/01	11,6	11,6		11,6	Kolaborasi penanganan kawasan kumuh antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan KOTAKU tahun 2019
KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	05, 06/01					
KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	01/02					
KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	01, 02/04					
KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	01/08					
KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	01, 02/09					
KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKULONAN	01, 02, 03, 05/02	13,16	13,16		13,16	Kolaborasi penanganan kawasan kumuh antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan KOTAKU tahun 2019
KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKULONAN	02/03					
KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	02, 03, 04/01	15	15		15	Kolaborasi penanganan kawasan kumuh antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan KOTAKU tahun 2019
KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULAG TIMUR	01, 02/17	12	12		12	Sudah sudah ditangani oleh Kota Tangsel tahun 2020, tinggal 4,01 Ha Bukan kewenangan Provinsi
KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PONDOK RANJI	03, 05/01	12,7	12,7		12,7	Kolaborasi penanganan kawasan kumuh antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan KOTAKU tahun 2019
KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPAYUNG	1/01, 01, 02/05, 03/02, 02/03, 03/04	10,61	10,61		10,61	Kolaborasi penanganan kawasan kumuh antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

								dan KOTAKU tahun 2019
KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CILENGGAN G	03, 04, 05/02		12,74		12,74	Telah ditangani oleh KOTAKU dan Kota Tangerang Selatan
KOTA TANGERANG	13 KECAMATAN	104 KELURAHAN		58,88	48,73	0,00	58,88	0
KOTA TANGERANG	KARAWACI	KOANG JAYA	RT1,3/RW5	12,76			12,76	Sudah ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tangerang dan KOTAKU
KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANGANYAR	RT02/04, RT03/05	10,59			10,59	Sudah ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tangerang dan KOTAKU
KOTA TANGERANG	LARANGAN	KREO SELATAN	RT4/RW6	11,63	11,63		11,63	Sudah ditangani oleh Kota Tangerang
KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN UTARA	RT01-05/01, RT01, 02, 04/07	13,78	13,78		13,78	Sudah ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tangerang dan KOTAKU
KOTA TANGERANG	BENDA	BENDA	RT1-4/RW8&10	10,12	10,12		10,12	Sudah ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tangerang dan KOTAKU
LUAS TOTAL KAWASAN KUMUH				375,29	425,41	100,14	391,60	

6. Capaian indikator program Kawasan permukiman, kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, target indikator kinerja Sub Kegiatan 219 Unit dengan capaian indikator Sub Kegiatan 219 Unit. Hasil penanganan dapat dilihat sebagai berikut :



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Nama Penerima	NIK Penerima	Alamat Penerima	NO SK PENERIMA	Tgl SK	Foto Sebelum	Foto Setelah
1	Asni	3602145108450004	RT 02 RW 09 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
2	Masti	3602144111450004	RT 02 RW 09 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
3	Sarmani	3602140704800007	RT 02 RW 09 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
4	Rakhmah	3602145405590002	RT 02 RW 09 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5	Amirul Yusup	3602141001760001	RT 02 RW 09 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022	 0%	 100%
6	Dewi Sukaesih	3602145011780008	RT 05 RW 08 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022	 0%	 100%
7	Yeyet	3602144202800003	RT 05 RW 08 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022	 0%	 100%
8	Tasman	3602141108710004	RT 02 RW 08 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022	 0%	 100%
9	Junaedi	3602140502680004	RT 02 RW 08 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022	 0%	 100%



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

10	Enok Rohati / Gatot Hartono	3602140702710006	RT 02 RW 08 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
11	Dede Adhari	3602142808680001	RT 02 RW 08 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
12	Junariah	3602146009450001	RW 08 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
13	Sutiah	3602145811570001	RT 01 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
14	Yati Suhaeti	3602146005630004	RT 01 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
15	Ending Bahaudin	3602142907610001	RT 02 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

16	Dini Suprihatini	3602146311920006	RT 02 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
17	Siti Komariah	3602146503710001	RT 02 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
18	Ira Yunita	3602144107940005	RT 02 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
19	Emi	3602144406590001	RT 02 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
20	Munajat	3602141203750011	RT 02 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
21	Ahmad Rifai / Atih Atikah	3602145409700001	RT 02 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
22	Endi Suhendi	3602140710790003	RT 02 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
23	Okta Dwi Cahya	3602146010000003	RT 02 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
24	Epep	3602140202430001	RT 02 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

25	Sapei	3602140109800007	RT 02 RW 11 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
26	Abdullah	3602141012770007	RT 01 RW 09 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
27	Nia Anti Antini	3602145405770003	RT 01 RW 08 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
28	Dedi Jumhedi Wijaya	3602142804690003	RT 01 RW 08 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
29	Aminudin	3602142502660003	Kp. Pulosari Rt. 001/012 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
30	Muhamad	3602140207750004	Kp. Pulosari Rt. 001/012 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
31	Lilis Listiawati	3602184201700003	Kp. Pulosari Rt. 001/012 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
32	Andi	3604210504940033	Sogata Rt/Rw. 014/004 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

33	Janah	3673044403580000	Kp. Kerasikan Masjid Rt/Rw. 007/002 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
34	Pe'i	3604212705590013	Kerasikan Masjid Rt/Rw. 007/002 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
35	Marta	3604211009750229	Tambulutan Rt 017/004 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
36	Jali	3673040910850001	Link. Bobojong Rt 015/004 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
37	Sartinah	3604216209740103	Kp. Derangong Rt 003/001 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
38	Jamsinah	3604214610650037	Kp. Derangong Rt 003/005 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
39	Tubi	3604210710840180	Kp. Keragilan Rt 010/003 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
40	Asmara	3604212112540302	Kp. Keragilan Rt 010/003 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
41	Pendi	3673040101840003	Kp. Bojong honje Rt 007/003 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

42	Rasmin	3604211210680298	Kp. Ketileng Rt 011/003 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
43	Sakimah	3604214102650312	Kp. Lisangku Rt 011/003 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
44	Sanan	3673040407840003	Kp. Kerasikan Masjid Rt/Rw. 007/002 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
45	Saeri	3604210403540001	Kp. Kerasikan Masjid Rt/Rw. 007/002 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
46	Dede Juandi	3604213008600431	Kp. Derangong Rt. 003/001 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
47	Hadoroh	3604214610900247	Kp. Tambulutan Rt. 017/004 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
48	Marsad	3604210612620130	Link. Sikebon Rt 002/005 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
49	Asik	3604210511520007	Kp. Sogata Rt/Rw. 014/004 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
50	Marsiti	3673044104570001	Kp. Curug Rt/Rw. 019/001 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

51	Yadi	3604211507780061	Kp. Lisangku Rt 011/003 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
52	Budiman Candra	3673042406920001	Sogata Rt/Rw. 014/004 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
53	Maisah	3673044812980001	Kp. Mayangka Rt.012/003 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
54	Jamsari	3604210601770546	Kp. Kerasikan Tonjol Rt/Rw. 008/002 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
55	Rubiah	3673045012490001	Kp. Kerasikan Calung Rt/Rw. 009/002 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
56	Usman	3604210205880056	Link. Kerasikan Tonjol Rt/Rw. 008/002 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
57	Sarkuni	3604211012740001	Kerasikan Tonjol Rt/Rw. 008/002 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
58	Napsinah	3604214704650239	Kp. Sogata Rt. 014/004 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
59	Jeni	3604210810700166	Kp. Babajong Rt. 015/004 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

60	Muslim	3673042007730002	Lingk. Sogata Rt. 014/004 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
61	Madroni	3604211011750047	Kp. Kerasikan Tonjol Rt/Rw. 008/002 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
62	Sa'adah	3604211011750047	Kp. Sikebon Rt. 002/001 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
63	Seni	3604216001560001	Kp. Sogata Rt. 014/003 Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
64	H. Haerudin / Mariah	3604114503720007	Kp. Batubeulah Rt/Rw. 002/001 Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
65	Nirah	3604114601820001	Kp. Cipete Rt/Rw. 003/003 Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
66	Sibah	3604114704680002	Kp. Cipete Rt/Rw. 003/003 Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

67	Marwati	3604114602650004	Kp. Cipete Rt/Rw. 003/003 Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
68	Munir	3604110201750002	Kp. Bunar Tengah Rt/Rw. 002/004 Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
69	Suhandi	3604110103840002	Kp. Bunar Rt.001/004 Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
70	Babay	3604114306950005	Kp. Gelingseng RT/RW. 003/004 Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
71	Kanah	3604115003620004	Kp. Cipete Rt/Rw. 002/003 Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
72	Sarikah bt Arwani	3604114602860003	Kp. Cipete Rt/Rw. 001/003 Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
73	Kutel	360104017750082	Kp. Rancaseneng Rt.010 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
74	Rasdi	3601041903710001	Kp. Rancaseneng Rt.010 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

75	Darpen	3601044107370012	Kp. Rancaseneng Rt.02 Rw.03 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
76	Karsum	3601040103830010	Kp. Rancaseneng Rt.010 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
77	Casno	3601040107700070	Kp. Rancaseneng Rt.010 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
78	Warjaya Kusuma Indra Putra	3601040107920102	Kp. Rancaseneng Rt.09 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
79	Nasirin	3601041501720001	KP. Cangkore Wetan Rt.01 Rw.04 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
80	Caskam	3601043005530001	Kp. Rancaseneng Rt.01 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
81	Kasem	3601046707740003	Kp. Rancaseneng Rt.010 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
82	Castim/Dasem	3601040509860006	Kp. Rancaseneng Rt.07 Rw.04 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

83	Nuryaman	3601040107830110	Kp. Rancaseneng Rt.09 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
84	Darminah	3601044107560041	Kp. Rancaseneng Rt.09 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
85	Warsam	3601040511860001	Kp. Rancaseneng Rt.010 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
86	Sunarto	3601040107730419	Kp. Rancaseneng Rt.07 Rw.04 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
87	Warlan	3601040107600036	Kp. Rancaseneng Rt.09 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
88	Darwan	36010401107740032	Kp. Rancaseneng Rt.06 Rw.03 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
89	Dede Dernawan	3601040107680102	Kp. Rancaseneng Rt.011 Rw.06 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
90	Rohayah	3601044107850405	Kp. Rancaseneng Rt.09 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

91	Asih	3601040107870056	Kp. Rancaseneng Rt.011 Rw.06 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
92	Nengsih	3601045605900004	Kp. Rancaseneng Rt.06 Rw.03 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
93	Rudi	3601041206770004	Kp. Babakan Cibaliung Rt.011 Rw.06 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
94	Wahyu	3601042105740001	Kp. Rancaseneng Rt.010 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
95	Casim	3601040107700034	Kp. Rancaseneng Rt.02 Rw.01 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
96	Daryem	3601044107450034	Kp. Rancaseneng Rt.01 Rw.04 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
97	Awin	3601040507540001	Kp. Cangkore Wetan Rt.03 Rw.02 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
98	Karminah	3601046704620001	Kp. Babakan Cibaliung Rt.012 Rw.06 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

99	Karnati	3601044809700002	Kp. Karang Jongkeng Rt.07 Rw.04 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
100	Raspin	3601042010830002	Kp. Cangkore Wetan Rt. 04 Rw.02 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
101	Sarni	3601044306760003	Kp. Rancaseneng Rt.05 Rw.03 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
102	Kosidah	3601044402900014	Kp. Rancaseneng Rt.07 Rw.05 Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
103	Yanah/Pardi	3601034606000006	KP.SUKAJADI BARAT RT 02/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
104	Nursih	3601034101730003	KP.SUKAJADI BARAT RT 03/06 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
105	Santiah	3601034607500001	KP.SUKAJADI BARAT RT 04/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
106	Eni	3601034501640001	KP.SUKAJADI BARAT RT 02/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
107	Arsiti	3601034402560001	KP.SUKAJADI BARAT RT 03/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

108	Soleh	3601030107760203	KP.SUKAJADI BARAT RT 03/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
109	Agus Gustian	3601030508850001	KP.SUKAJADI BARAT RT 05/03 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
110	Nurpatimah	3601031106700001	KP.SUKAJADI BARAT RT 05/03 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
111	Rusdi	3601030207630010	KP.SUKAJADI BARAT RT 03/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
112	Pulung	3601030301750002	KP.SUKAJADI BARAT RT 02/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
113	Meni Hidayat	3601030205770002	KP.SUKAJADI BARAT RT 05/03 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
114	Junah	3601035011830003	KP.SUKAJADI BARAT RT 03/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
115	Aminah	3601034701660002	KP.SUKAJADI BARAT RT 05/02 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
116	Jarmin	3601032311540001	KP.SUKAJADI BARAT RT 02/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
117	Kunaenah	3601035403600001	KP.SUKAJADI BARAT RT 03/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

118	Arsinah	3601034405520001	KP.SUKAJADI BARAT RT 05/03 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
119	Rosih	3601036004830001	KP.SUKAJADI BARAT RT 03/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
120	Onjo	3601030203620001	KP.SUKAJADI BARAT RT 02/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
121	Surniah	3601034706890002	KP.SUKAJADI BARAT RT 02/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
122	Jamarudin	3601271106920001	KP.SUKAJADI BARAT RT 02/07 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
123	Irot	3601034807600002	KP.SUKAJADI BARAT RT 02/05 Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
124	Encuk	3601280107810044	KP. PASAWAHAN RT. 007/RW.003 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

125	Isbak	3601280107730118	KP. PASAWAHAN RT. 007/RW.003 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
126	Nian Suherman	3601280107810059	KP. CIBEUREUM RT. 011/RW.004 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
127	Sakim	3601280107650018	KP. CIBEUREUM RT.010/RW.004 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
128	Sari	3601285810410001	KP. CIBEUREUM RT. 010/RW.004 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
129	Masih	3601280107800021	KP. CIBEUREUM RT. 010/RW.004 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
130	Ata	3601280206800020	KP. CIBEUREUM RT. 010/RW.004 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
131	Sarni	3601284107730132	KP. CIBEUREUM RT.010/RW.004 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

132	Usman	3601280107730136	KP. CIBEUREUM RT.010/RW.004 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
133	Utun Sumarya	3601280107680131	KP. KADALEMAN RT. 008/RW.003 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
134	Asep	3601280209820001	KP. KADALEMAN RT. 008/RW.003 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
135	Buang	3601280107760042	KP. KADALEMAN RT. 008/RW.003 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
136	Arman	3601280107670016	KP. KADALEMAN RT.016/RW.003 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
137	Supyani	3601282505580001	KP. KADUJOGJA RT.015/RW.005 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
138	Saman	3601282710790003	KP. KADUJOGJA RT.015/RW.005 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
139	Jasrah	3601284107840061	KP. KADUJOGJA RT.015/RW.005 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
140	Jaskah/ Asiman	3601284107580082	KP. KADUJOGJA RT. 014/RW.005 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
141	Satra	3601280106670001	KP. KADUJOGJA RT. 015/RW.005 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
142	Iyang/Iyon	3601284107880078	KP. KADUJOGJA RT. 014/RW.005 Desa Carita	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

			Kec. Carita Kab. Pandeglang				
143	Jahari	3601280107730162	KP. KADUJOGJA RT. 014/RW.005 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
144	Siman	3601281708690004	KP. KADUJOGJA RT. 015/RW.005 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
145	Roikah/Misra	3601284206820010	KP. KADUJOGJA RT. 014/RW.005 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
146	Rais/Junati	3601280107660002	KP. PANGUSEUPAN RT.003/RW.001 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
147	Emi	3601286705520001	KP. PANGUSEUPAN RT.003/RW.001 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
148	Anah/Janah	3601285203570001	KP. PANGUSEUPAN RT.003/RW.001 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
149	Rukmini	3601289296800018	KP. PANGUSEUPAN RT.003/RW.001 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
150	Niah	3601284607500003	KP. CIBEUREUM RT.010/RW.004 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
151	Masripah	3601284107560010	KP. MESJID RT. 009/RW.003 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		
152	Naci	3601284107530068	KP. MASJID RT. 009/RW.003 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim- 3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

153	Winah Kamsin	3601284608820001	KP. PANGUSEUPAN RT.002/RW.001 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
154	Nadi	3601282612840001	KP. PANGUSEUPAN RT.002/RW.001 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
155	Arsi	3601280107230006	KP. CIBEUREUM RT.010/RW.004 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
156	Marnah/ Walan	3601280910840001	KP. PANGUSEUPAN RT.002/RW.001 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
157	Jamah	3601284107610026	KP. PANGUSEUPAN RT.003/RW.001 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
158	Buang/ Karman	3601280107760042	KP. PANGUSEUPAN RT.001/RW.001 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
159	Buang/Enah Sukaenah	3601284204850001	KP. PANGUSEUPAN RT.001/RW.001 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
160	Lamri	3601280107730138	KP. CIBEUREUM RT.010/RW.004 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
161	Kasim	3601284107330020	KP. CIBEUREUM RT.010/RW.004 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
162	Yadi Sardi	3601281207890006	KP. PASAWAHAN RT.006/RW.002 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

163	Satari	3601280107530088	KP. CIBEUREUM RT. 010/RW.004 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
164	Elijah	3601284107790026	KP. PASAWAHAN RT. 006/RW.002 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
165	Sukma	3601281806690001	KP. MASJID RT. 009/RW.003 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
166	Sukma	3601285504760001	KP. MASJID RT. 018 RW. 003 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
167	Sapiah	3601286107700001	KP. MESJID RT. 009/RW.003 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
168	Suhada	3604310606780002	KP. KADU JOGJA RT.014/005 Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	600/SK.457.b/Perkim-3/2022	27 Mei 2022		
169	JUWENAH	3604135006650001	KP. Lontar RT. 004 RW. 001 Desa Lonar KEC. Tirtayasa Kab. Serang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
170	BABAY FAHRUDIN	3604130107800029	KP. Lontar RT. 012 RW. 003 Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Sserang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
171	KASNAM	3604131003770004	KP. MARGIYASA RT. 008 RW. 002 DESA LONTAR KEC. TIRTAYASA KAB. SERANG	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
172	ONAH	3604134409910005	KP. MARGIYASA RT. 008 RW. 002 DESA LONTAR KEC. TIRTAYASA KAB. SERANG	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
173	MUJENI	3604131105890002	KP. SAWAH RT. 006 RW. 002 DESA LONTAR KEC. TIRTAYASA KAB. SERANG	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

174	MASKUR	3604131001650003	KP. BARU RT. 015 RW. 004 DESA LONTAR KEC. TIRTAYASA KAB. SERANG	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
175	ARMI	3604137009730001	KP. MARGIYASA RT. 008 RW. 002 DESA LONTAR KEC. TIRTAYASA KAB. SERANG	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
176	Sakhrani	3604130405550002	Kp. Langgen Rt.002/001 Ds. Alang-Alang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
177	Hawasi	3604130102570001	Kp. Supung Desa Alang-Alang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
178	Dahroni	3604132808860004	Kp. Langgen Rt.002/001 Ds. Alang-Alang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
179	SARNIYAH	3604135005580001	KP. KAIBON GEDE RT. 008 RW. 003 DESA KEMANISAN KEC. TIRTAYASA KAB. SERANG	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
180	SADELI	3604132912750000	KP. CIWULUNG RT. 006 RW. 002 DESA KEMANISAN KEC. TIRTAYASA KAB. SERANG	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
181	SARIM	3604130507650005	KP. KERAJAN RT. 004 RW. 002 DESA KEMANISAN KEC. TIRTAYASA KAB. SERANG	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
182	Ruslan	3604140101790001	Kp. Tanara RT. 002 RW. 001 Desa Tanara Kecamatan Tanara Kabupaten Serang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
183	Rupi'ah	3604146007910005	Kp. Tanara RT. 003 RW. 001 Desa Tanara Kecamatan Tanara Kabupaten Serang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

184	Siti Rapih	3604144182780005	Kp. Sukamaju RT. 002 RW. 003 Desa Tanara Kecamatan Tanara Kabupaten Serang	600/SK.1166a/Perkim- 3/2022	27 Oktober 2022		
185	Asliyah	3671065505710002	Jl. Sunan Gunung Jati RT. 01/12 Kel Panninggilan Kec. Ciledug Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim- 3/2022	27 Oktober 2022		
186	Asman Biniyan	3671060703510001	Panninggilan RT. 01/04 Kel Panninggilan Kec. Ciledug Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim- 3/2022	27 Oktober 2022		
187	Rohadi	3671060609860006	Panninggilan RT. 01/12 Kel Panninggilan Kec. Ciledug Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim- 3/2022	27 Oktober 2022		
188	Nasa	3671062511570002	Jl. H. Dirin RT. 01/04 Kel Panninggilan Kec. Ciledug Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim- 3/2022	27 Oktober 2022		
189	Sadih	3671064606600001	Panninggilan RT. 03/04 Kel Panninggilan Kec. Ciledug Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim- 3/2022	27 Oktober 2022		
190	Saim	3671063112420007	Jl. H.M. Yusuf RT. 03/10 Kel Panninggilan Kec. Ciledug Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim- 3/2022	27 Oktober 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

191	Saleh		Paninggilan RT. 04/04 Kel Paninggilan Kec. Ciledug Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim- 3/2022	27 Oktober 2022		
192	Siti Mariam	3671065901770003	Jl. H. Dirin RT. 01/04 Kel Paninggilan Kec. Ciledug Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim- 3/2022	27 Oktober 2022		
193	Nur Asiah Jamil	3671134606730015	Jl. Sawo No. 27 RT. 07/06 Kel. Cipadu Kec. Larangan Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim- 3/2022	27 Oktober 2022		
194	HJ. ASİYAH BT. H. ACHFAS	3671134303640006	Kp. Cipadu RT. 02/06	600/SK.1166a/Perkim- 3/2022	27 Oktober 2022		
195	ARTINAH	3671135506500003	Kp. Poncol No. 30 RT. 04/04	600/SK.1166a/Perkim- 3/2022	27 Oktober 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

196	HAMIDAH	3671135003620003	Kav. Setia Budi No. 19 RT. 03/05	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
197	RIKA HANDAYANI	3671136404790006	Kp. Poncol No. 33 RT. 06/01	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
198	Marwoto	3671131310770002	Kp. Poncol RT. 06/01 Kel. Cipadu Kec. Larangan Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
199	SAINAH	3671130101560007	Kp. Cipadu RT. 02/06	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
200	Marhumah	3671134905650003	Jl. Penghulu No. 60 RT. 01/06 Kel. Cipadu Jaya Kec. Larangan Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
201	HAMDANI	3671132112580003	Kp. Cipadu Bulak No. 30 RT. 02/06	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
202	Syamsudin	3671062607640003	Kp. Dukuh RT. 02/07 Kel. Sudimara Kec. Ciledug Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
203	Roliyah	3671064104690003	Jl. Mesjid Rt. 03 Kel. Sudimara Timur Kec. Ciledug Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
204	Soid	3671132107670004	Jln Wahid Hasyim RT. 01 RW. 06 Kel. Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
205	Rojaya		Jl. Kejaksaan RT. 02/06 Kel. Kreo Kec. Larangan Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
206	Suwan	3671130809540001	Jl. Bambu RT. 04/07 Kel. Kreo Kec. Larangan Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

207	Masjai	3671130607670007	Jl. Swedaya Baru II No. 30 RT. 02/04 Kel. Larangan Indah Kec. Larangan Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
208	Sawiyah	3603295007770006	Jl. Nurul Amal 3 RT. 02/06 Kel. Larangan Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
209	Rohimah	3671135406540003	Kp. Panggilan RT. 02/07 Kel. Larangan Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
210	Hilman	3671131206840007	Jl. Masjid Raya No. 49 RT. 03/06	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
211	RUDI SANJAY	3671131204770006	Jl. Sunan Kali Jaga No. 31 RT. 03/011	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
212	JAMALUDIN	3671131901780006	Jl. Sunan Kali Jaga RT. 005/011	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
213	HANAFI	3671130707770015	Jl. Sunan Kalijaga No. 50 RT. 03/011	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
214	HASBIH YUSUF	3671132510600002	Jl. Sunan Kalijaga RT. 005 RW. 011	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
215	KHAERUDIN	3671021606870010	Kp. Dumpit RT. 02/05	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
216	HENDRIS	3671020506830005	Kp. Kebon Cau RT. 01/08	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
217	M. YUSUF	3671020707530001	Kp. Gembor RT. 03/05 Kel. Pasir Jaya	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
218	Mardanu Nur Ikhsan	3671010308980002	Jl. Supriadi RT. 05/04 Kel. Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		
219	Sutrimati	3671024705710006	Kp. Pabuaran Rt. 02/02	600/SK.1166a/Perkim-3/2022	27 Oktober 2022		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

IKU Kedua yaitu **Persentase Rumah Layak Huni**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 88,66%

Realisasi : 76,14%

Capaian : 85,88%

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Rumah Layak Huni dengan capaian kinerja 85,88% bersumber dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Desember Tahun 2022. Namun terdapat capaian indikator kinerja program yang pengaruhnya sangat kecil terhadap hasil capaian indikator kinerja sasaran, yaitu Program Pengembangan Perumahan dan Program Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Realisasi dan capaian indikator kinerja Program Pengembangan Perumahan dilaksanakan oleh 4 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 1. Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani dengan capaian kinerja sebesar 100%
 2. Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana dengan capaian kinerja sebesar 100%
 3. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 4. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 5. Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dengan capaian kinerja sebesar 100%
 6. Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dengan capaian kinerja sebesar 100%
- b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 1. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator dengan capaian kinerja sebesar 100%



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- c. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 79,12%
 1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan capaian kinerja sebesar 100%
 2. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dengan capaian kinerja sebesar 37,36%
 3. Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dengan capaian kinerja sebesar 100%
- d. Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
 1. Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%

Realisasi dan capaian indikator kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dilaksanakan oleh 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan capaian kinerja 99,82%
 1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman dengan capaian sebesar 99,83%
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman dengan capaian sebesar 100%
 3. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman dengan capaian sebesar 100%

Berdasarkan hasil capaian pada indikator kinerja program, dapat dihitung capaian program Pengembangan Perumahan dan program prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) melalui perhitungan realisasi atas rata-rata capaian indikator program dibagi target kinerja program tersebut, yaitu:

$$\frac{94,78}{100} \times 100 = 94,78\%$$

Dapat dilihat dari perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dan capaian indikator kinerja program melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan, menunjukkan hasil yang tidak selaras, dimana capaian indikator kinerja program yang rendah berpengaruh sangat kecil terhadap hasil capaian indikator kinerja sasaran, karena kinerja program hanya bagian dari



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

penanganan rumah layak huni. Kondisi tersebut lebih disebabkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Data capaian kinerja sasaran **Persentase Rumah Layak Huni** tidak bisa hanya dicapai dari indikator kinerja program, karena sesuai Renstra Revisi 2017-2022 definisi operasionalnya adalah jumlah rumah layak huni di Provinsi Banten, bukan hanya berdasarkan kewenangan Provinsi
2. Data capaian kinerja atas indikator sasaran tersebut bersumber dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Desember Tahun 2022 dengan target indikator sebesar 76,14% dan capaian indikator sebesar 88,88%, hasil capaian indikator dengan perhitungan rata-rata sebagai berikut :
 - Luas Lantai Rumah (m²) $\geq$ 72 sebesar 52,55%
 - Bahan bangunan utama Atap rumah terluas (Genteng) sebesar 76,76%
 - Bahan bangunan utama Dinding rumah terluas (tembok) sebesar 90,90%
 - Bahan bangunan utama Lantai rumah terluas (keramik) sebesar 84,36%
3. Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan provinsi dalam penanganan rumah tidak layak huni yaitu pada Rumah bagi Korban Bencana Provinsi dan Relokasi Program Provinsi
4. Program pengembangan perumahan dan Program prasarana, sarama dan utilitas umum adalah program yang saling mendukung, kedua program tersebut pengaruhnya terhadap pencapaian target indikator sasaran sangat kecil, sesuai definisi operasional sasaran yaitu cakupan rumah layak huni di Provinsi Banten. Rumah layak huni di Provinsi Banten salah satunya dari hasil pembangunan rumah bagi korban bencana. Hal tersebut dikarenakan prioritas pembangunan bagi korban bencana adalah rakyat miskin dan berpenghasilan rendah.

KEBERHASILAN

Keberhasilan dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengampu sasaran **Persentase Rumah Layak Huni** adalah :

1. Capaian target indikator program pengembangan perumahan melalui Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan Sub kegiatan pembanguann Bagi Rumah Bencana yang tersebar Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pandeglang. Pembangunan bagi rumah bencana dengan target 91 Unit dan realisasi 34 unit, berikut hasil pelaksanaan pembanguannya seperti berikut ini :



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	NAMA	NIP	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	UKURAN LAHAN	JENIS PENANGANAN	JENIS BENCANA	0%	50%	100%
1	SAINAN/KAMSINAH	3604045108600024	Link Legok Dalem RT 002/002	DRANGONG	TAKTAKAN	KOTA SERANG	L : 11 M P: 15 M	Risha	Banjir Bandang			
2	BARDAH	3604035507500001	LINGK. Kenari RT 014/005	KASUNYATAN	KASEMEN	KOTA SERANG	L : 5,50 M P: 7,70 M	Konvensional	Banjir Bandang			
3	MU'AINAH	3604034308700129	Kp. Priyai Langgar RT 002 RW 002	MASJID PRIYAYI	KASEMEN	KOTA SERANG	L : 7.70 M P : 11 M	Risha	Banjir Bandang			
4	HABIB	3604032706830117	Kp. Cibomo RT 008 RW 003	BENDUNG	KASEMEN	KOTA SERANG	L : 7,50 M P : 13, 10 M	Risha	Banjir Bandang			
5	MUNAWAROH	3604035307690275	Kp. Kenari RT 013 / 005	KASUNYATAN	KASEMEN	KOTA SERANG	L : 5,50 MP : 14 M	Konvensional	Banjir Bandang			



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

6	HAYUMI	3604030610910049	Kp. Angsoka Jaya RT 02 / 09	KASEMEN	KASEMEN	KOTA SERANG	L : 7 M P : 8 M	Risha	Banjir Bandang			
7	ARDABILI	3604030707640133	Kp. Keganteran RT 001 / 005	KASEMEN	KASEMEN	KOTA SERANG	L : 5,90 M P : 15,90 M	Konvensional	Banjir Bandang			
8	RUMINAH	3673024405860002	Kp. Angsana 002/006	KASEMEN	KASEMEN	KOTA SERANG	L : 6 M P : 13,80 M	Konvensional	Banjir Bandang			
9	SUMARDI	3602231304850002	KP. LEUWI SIEUN RT 002 RW 003	CANDI	CURUGBITUNG	LEBAK		Risha	Banjir Bandang			
10	ASMIN	3602231803780001	KP. LEUWI SIEUN RT 001 RW 003	CANDI	CURUGBITUNG	LEBAK		Risha	Banjir Bandang			



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

11	SANGSANG	3602231005610003	KP. ROKE RT 001 R 004	CANDI	CURUGBITUNG	LEBAK		Risha	Banjir Bandang			
12	KARNA	3602232001690002	KP. LEUWI SIEUN RT 001 RW 003	CANDI	CURUGBITUNG	LEBAK		Risha	Banjir Bandang			
13	RASIDI	3201191008750003	KP. ROKE RT 001 R 004	CANDI	CURUGBITUNG	LEBAK		Risha	Banjir Bandang			
14	MUSA	3602230206550001	KP. LEUWI SIEUN RT 002 RW 003	CANDI	CURUGBITUNG	LEBAK		Risha				
15	AOLIAH	3602234804740003	KP. KENCEH RT 002 RW 004	CILAYANG	CURUGBITUNG	LEBAK		Risha	Banjir Bandang			



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

16	MAD RASAD	3604142503090016	Kp. Kemuludan Rt 01 Rw 02	DESA TANARA	TANARA	KAB SERANG	Lolos	Konvensional	Cuaca Ekstrim			
17	ROHMAH / ADE ROSWARA	3604150702130006	Kp. Tegal 1 Rt 02 Rw 02	DESA SONGGOM	CIAKNDE	KAB SERANG	Lolos	Risha	Gempa			
18	JUMAH	3604176706430001	Kp. Karang Jetek RT 09 RW 02	DESA MANDAYA	CARENANG	KAB SERANG	Lolos	Risha	Cuaca Extrim			
19	ATANG/SANADI	3604240405090001	Kp. Ranjang Rt 04 Rw 02	DESA SANGIANG	PAMARAYAN	KAB SERANG	Lolos	Risha	Gempa			
20	NARWAN	3604241102077292	Kp. Jalupang Pasir Rt 006 Rw 003	DESA SANGIANG	PAMARAYAN	KAB SERANG	Lolos	Konvensional	Kebakaran			



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

21	MURSIPAH	3604122309130003	Kp. Domas Rt 013/002	DESA DOMAS	PONTANG	KAB SERANG	Lolos	Risha		Cuaca Extrim			
22	YUDIN AWALUDIN	3603232009650003	KP. CILEGONG 001/001	MEKAR WANGI	CISAUK	TANGGERANG		1. KTP/KK 2. SERTIFIKAT 3. DINGDING BATA PERMANEN 4. LANTAI RABAT BETON LAMA 5. ATAP KAMAR /RUANGTAMU BILIK SUDAH RUSAK	Angin Putnig Beliung				
23	MURSAH	3603195605870007	KP. RANCA DULANG 007/002	RANCA IYUH	PANONGAN	TANGGERANG		1. KTP/KK 2. SERTIFIKAT 3. DINGDING BILIK 4. LANTAI RABAT BETON LAMA 5. ATAP KAMAR /RUANGTAMU BILIK SUDAH RUSAK	Angin Putnig Beliung				
24	SUANI/NENENG	3603194306730006	KP. GARUDUG 008/002	RANCA IYUH	PANONGAN	TANGGERANG		1. KTP/KK 2.DINGDING GRS 3. LANTAI RABAT BETON LAMA/SEBAGIAN TANAH 4. ATAP KAMAR /RUANGTAMU BILIK SUDAH RUSAK	Angin Putnig Beliung				
25	SUMARNI	3603204503700002	KP. CIANGIR 001/004	CIANGIR	LEGOK	TANGGERANG		1. KTP/KK 2.DINGDING BILIK 3. LANTAI RABAT BETON LAMA/SEBAGIAN TANAH 4. ATAP KAMAR /RUANGTAMU BILIK SUDAH RUSAK	Angin Putnig Beliung				



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

26	YATI	3603206602700001	KP. BOJONG BITUNG 002/003	CIANGIR	LEGOK	TANGGERANG	1. KTP/KK 2.DINGDING BILIK 3. LANTAI RABAT BETON LAMA/SEBAGIAN TANAH 4. ATAP KAMAR /RUANGTAMU BILIK SUDAH RUSAK	Angin Putnig Beliung			
27	MARHAMAH	3603206106570003	KP. GARDU 001/001	CIRARAB	LEGOK	TANGGERANG	1. KTP/KK 2.SPPT 3. DINGDING PERMANEN 4. LANTAI RABAT BETON	Angin Putnig Beliung			
28	NURHASAN	3603221211780005	KP. RANCAHAUR 002/001	MALANG NENGAH	PAGEDANGAN	TANGGERANG	1. KTP/KK 2.SPPT 3. DINGDING BILIK 4. LANTAI RABAT BETON 5. ATAP KAMAR /RUANGTAMU BILIK SUDAH RUSAK 6. KAMAR MANDI RUSAK	Angin Putnig Beliung			
29	FUAT	3603220904820003	KP. KARANG TENGAH 001/001	KARANG TENGAH	PAGEDANGAN	TANGGERANG	1. KTP/KK 2.SPPT 3. DINGDING BILIK 4. LANTAI RABAT BETON 5. ATAP KAMAR /RUANGTAMU BILIK SUDAH RUSAK	Angin Putnig Beliung			
30	SITI ROHMAH	3603205311760001	KP. PALASARI 001/004	PALASARI	LEGOK	TANGGERANG	P 9/L 6 1. BAGUNAN TEMBOK PERMANEN2. KTP/KK3. TANAH MILIK PRIBADI DAN BERSERTIFIKAT	Angin Puting Beliung			



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

31	MARNAH	3601285706710002	KP. PAGEDONGAN RT 001 RW 006	SUKAJADI	CARITA	PANDEGLANG	KONVENSIONAL	P : 7 M L : 8 M	Angin Putnig Beliung			
32	SUKMANAH	3601175302680001	KP. GIRIPAWANA RT 001 RW 002	GIRIPAWANA	MANDALAWANGI	PANDEGLANG	RISHA	P : 8 M L : 9 M	Angin Puting Beliung			
33	KANIMAH	3601234107550024	KP. PASIR PICUNG RT 018 RW 005	CIBARANI	CISATA	PANDEGLANG	RISHA	P : 8 M L : 9 M	Kebakaran			
34	EEN SUHENAH	3601104107450009	KP. PARAKAN RT 004/005	BANYUMAS	BOJONG	PANDEGLANG	RISHA	P : 10 ML : 8 M	Angin Putnig Beliung			

KEGAGALAN

Kegagalan dari program, kegiatan dan Sub kegiatan yang mengampu sasaran **Persentase Rumah Layak Huni** adalah :

1. Pada Program Pengembangan Perumahan, kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana capaian kinerjanya sebesar 37,36%, hal tersebut dikarenakan:
 - Sampai dengan Tanggal 27 November 2022 masih terdapat pelaksanaan pekerjaan terkait pematangan lahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak serta proses perkerasan jalan lingkungan di kawasan Relokasi Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak sehingga tidak bisa dilintasi oleh kendaraan proyek/pengangkut panel RISHA
 - Pengiriman panel RISHA sudah dilaksanakan pada Tanggal 30 Oktober s.d. 27 November 2022 sebanyak 26 unit dari 34 unit yang dimohonkan
 - Karena adanya beberapa item material yang tidak terinput, atas arahan TIM SATGAS BPKP merekomendasikan agar melakukan pergeseran anggaran T.A 2022, namun pergeseran terbit saat perubahan sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi
2. Tahun anggaran 2023 sesuai target renstra 2023-2026, indikator sasaran persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau dengan definisi operasional Penyediaan rumah layak huni di Provinsi Banten yang ditangani oleh Provinsi (Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Provinsi).
3. Kurangnya pekerja yang membuat panel RISHA, karena banyak pekerja yang sudah ahli lalu berhenti bekerja dan membangun usaha sendiri. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan pembangunan rumah
4. Sulitnya membawa panel RISHA ke lokasi pembangunan rumah terutama lokasinya jauh dari workshop Dinas Perkim Provinsi Banten, sehingga memperlambat pemasangannya.
5. Belum memilikinya armada pengangkut RISHA, selama ini pengangkutan melalui sewa. Keterbatasan pengangkutan juga mengakibatkan keterlambatan barang menuju lokasi pembangunan



IKU Ketiga yaitu **Cakupan pelayanan pengelolaan sampah**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 20%
Realisasi : 0%
Capaian : 0%

Realisasi indikator kinerja sasaran Cakupan pelayanan pengelolaan sampah dengan capaian kinerja 0% adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan indikator kinerjanya cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional dengan capaian sebesar 0%.

Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja masing-masing program dapat dilihat dibawah ini :

- 1) Realisasi dan capaian indikator kinerja Program Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dilaksanakan oleh 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan capaian kinerja 0%
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan dengan capaian kinerja 0%
 - 2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja 0%

Berdasarkan hasil capaian pada indikator kinerja program, dapat dihitung Program Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional melalui perhitungan capaian indikator program dengan target kinerja program tersebut, yaitu:

$$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$$

Dapat dilihat dari perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dan capaian indikator kinerja program melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan, menunjukkan hasil yang selaras, dimana capaian indikator kinerja program berpengaruh terhadap hasil capaian indikator kinerja sasaran



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

namun dengan capaian kinerja nol. Adapun kegagalan dan alternatif solusi sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja program cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional pada tahun anggaran 2022 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terkendala kesiapan lokasi lahan. Pada tahun anggaran 2022 dierncanakan akan dilaksanakan masterplan industri pengolahan sampah WKP III (Maja), namun dikarenakan lahannya belum siap sehingga anggarannya di rasionalisasi
2. Telah dilakukan studi pengadaan lahan industri pengolahan sampah WKP I (Cilowog) dan WKP III (Maja).
 - 1) Hasil studi WKP I (Cilowong) di dokumen RTRW menyebutkan bahwa tidak ada perluasan di Cilowong, namun hanya melayani TPA Kota Serang, dengan demikian untuk pembangunan pengeloan sampah di Cilowong tidak dapat dilanjutkan.
 - 2) Hasil Studi WKP III (Maja) dilanjutkan dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah (DPPT) Maja tahun anggaran 2023
3. Diusulkan Cileles menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), namun cileles belum masuk ke dalam RTRW Provinsi Banten, direncanakan untuk disesuaikan pada Dokumen RTRW Provinsi Banten. Lokasi Cileles merupakan Kawasan kehutanan yang rencananya akan dilakukan pengalihan atas hak atas tanah menjadi Hak Guna Usaha (HGU)
4. Tahun 2023 direncanakan penyusunan FS Cileles dan penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST (RISPAH) Kewenangan Provinsi
5. Tahun anggaran 2023 **program cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional** menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten

Indikator kinerja sasaran **Cakupan pelayanan pengelolaan sampah** diampu oleh Program cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional sesuai definisi operasional yaitu tersedianya fasilitasi pengelolaan sampah regional perkotaan dan perdesaan, akan tetapi selain Program cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional, Dinas Perkim juga melaksanakan Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Kedua program tersebut tidak diampu oleh indikator sasaran pengelolaan sampah, namun merupakan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Perkim, sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana salah satunya adalah **SPM Pekerjaan Umum**.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja masing-masing kedua program dapat dilihat dibawah ini :

- 1) Realisasi dan capaian indikator kinerja program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum, dilaksanakan oleh 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan dengan capaian kinerja sebesar 100%
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan capaian kinerja sebesar 100%
 3. Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM dengan capaian kinerja sebesar 100%
- 2) Realisasi dan capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Limbah, dilaksanakan oleh 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional dengan capaian kinerja sebesar 0%
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan capaian kinerja sebesar 0%
 2. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat dengan capaian kinerja sebesar 0%

Adapun kegagalan dan alternatif solusi sebagai berikut :

1. Capaian indikator selain program Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, yaitu :
 - 1) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum capaian indikatornya sebesar 95,01%. Data capaian bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Desember Tahun 2022.
 - 2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan capaian indikatornya 0%, dikarenakan pada tahun 2022 hanya melaksanakan penyusunan DED IPAL strategis KP3B dan konstruksinya belum dilaksanakan karena adanya pengurangan anggaran. Pekerjaan tersebut bukan bagian dari kewenangan provinsi yaitu pengelolaan air limbah regional, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam capaian indikator program.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Tahun anggaran 2023 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

5.3. Capaian Sasaran 3, Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas

IKU yaitu **Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 96,87%

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi dengan capaian kinerja 96,87% adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator kinerjanya persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi dengan capaian sebesar 100%, serta program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan indikator kinerja persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi dengan capaian sebesar 93,75%.

- 1) Realisasi dan capaian indikator kinerja Program Penatan Bangunan Gedung Stragis, dilaksanakan oleh 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut :

Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan capaian indikator sebesar 100%

1. Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100%

- 2) Realisasi dan capaian indikator kinerja program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dilaksanakan oleh 1 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut :

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian indikator sebesar 93,75%.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 100%
2. Sub Kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan dengan capaian kinerja sebesar 100%
3. Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan capaian kinerja sebesar 80%
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan dengan capaian kinerja sebesar 100%

Berdasarkan hasil capaian pada indikator kinerja program tersebut, dapat dihitung capaian Program Penatan Banguan Gedung Stragis dan program Penataan Bangunan dan Lingkungannya melalui perhitungan realisasi atas rata-rata capaian indikator program dibagi target kinerja program tersebut, yaitu:

$$\frac{96,87}{100} \times 100 = 96,87\%$$

Dapat dilihat dari perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dan capaian indikator kinerja program melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan, menunjukkan hasil yang selaras, dimana capaian indikator kinerja program yang berpengaruh terhadap hasil capaian indikator kinerja sasaran. Hal-hal yang menjadi permasalahan dan hambatannya adalah :

1. Dasar Perhitungan capaian indikator program Penatan Banguan Gedung Stragis melalui pelaksanaan kegiatan pemeliharaan di Kawasan banten lama, Kawasan KP3B dan Kawasan Sport Centre pada program tersebut telah mencapai target.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan, pekerjaan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi Banten Desa Cireundeu, Kec. Cilograng, Kab. Lebak, putus kontrak dikarenakan lokasinya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pembangunan fisik (lokasi pekerjaan terlalu ekstrim)
3. Tahun anggaran 2023 program Program Penataan Bangunan Gedung Stragis dan program Penataan Bangunan dan Lingkungannya menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.4 Penyesuaian Strategi dan Kebijakan atas Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian indikator kinerja baik sasaran dan program seperti yang telah diuraikan, maka diperlukan beberapa penyesuaian atas strategi dan kebijakan organisasi. Penyesuaian strategi guna mencapai kinerja pada tahun mendatang, sebagai berikut :

1. Penyesuaian pelaksanaan yang dilaksanakan melalui program pengembangan perumahan, terutama pembangunan rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi, terutama sumber daya manusia (pencetak RISHA) agar diperbanyak melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim.
2. Penyesuaian anggaran melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang mendukung indikator kinerja organisasi

Sedangkan dalam melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi yang telah direncanakan
2. Urusan pekerjaan umum pada sub urusan Air Minum, Persampahan dan Air Limbah pada tahun anggaran 2022 merupakan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman namun tahun anggaran 2023 menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, sehingga indikator capaiannya menjadi indikator capaian Dinas PUPR.

5. Analisa atas Efektivitas dan Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan keterbatasan anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola Lembaga agar dapat berjalan secara optimal serta sarana prasarana yang memadai merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh ketiga unsur tersebut.

a. Anggaran

Pagu anggaran murni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada Belanja Operasi sebesar Rp. 531.524.495.595,00. Realisasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 384.515.665.405,00. Pada anggaran perubahan Belanja Operasi sebesar Rp. 658.867.228.385,00 atau 96,42% dari pagu anggaran sebesar Rp. 683.319.161.254,00. Realisasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 358.968.490.879,00 atau 96,32% dari pagu anggaran sebesar



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rp. 372.672.075.140,00. Efektifitas dan efisiensi dalam penyerapan anggaran dan belanja Tahun 2022 terdapat pada Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meruapan efesiensi dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan belanja perjalanan dinas dalam kota sudah mencukupi
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, efesiensi dari Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, anggaran sudah mencukupi dan realisasi fisik 100%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, efesiensi dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor, kebutuhan ATK dan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika, Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, anggaran sudah mencukupi dan realisasi fisik 100%
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, efesiensi dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor, kebutuhan ATK dan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia. Selain itu terdapat anggaran yang tidak digunakan yaitu Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, dikarenakan mekanisme pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah APBD Provinsi Banten
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, efesiensi dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Biasa serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH). Selain itu terdapat anggaran yang tidak digunakan dari Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sevbesar Rp. 10.824.000 selama 12 bulan
 - biaya telepon
 - Jasa Internet Kantor aplikasi Zoom



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Jasa Internet Kantor TV Kabel
dikarenakan pembayarannya dengan sistem transfer tidak sesuai dengan sistem pembayaran yang dilaksanakan oleh PT TELKOM, sehingga tidak dapat dibayarkan
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, efisiensi dari belanja Modal Peralatan Personal Computer, penyediaan Persobal Comuter dan Pritter sudah terpenuhi. Selain itu terdapat anggaran yang tidak digunakan Belanja Modal Personal Computer (Laptop 13 INCH 3 unit spektr tidak ada di TKDN), serta Belanja Modal Loader, Self Loader (1 Unit), tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan hanya 2 bulan.
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, efisiensi dari Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Tenaga Supir, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, efisiensi dari Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat, Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat, Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat, Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat, Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus. Selain itu terdapat anggaran yang tidak digunakan yaitu Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat komunikasi telephone (PABX), dikarenakan pagu anggarannya tidak mencukupi sehingga tidak dapat dilaksanakan.
- 9. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, efisiensi dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa dan Pra Desain Arsitektural dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- 10. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, efisiensi dari Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendampingan dan fasilitator sudah terelaisasi, Honor narasumber sudah mencukupi
- 11. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, efisiensi dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Biasa serta Belanja



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perjalanan Dinas Dalam Kota. Selain itu terdapat anggaran yang tidak digunakan pembangunan RTLH dengan metode RISHA terkait pematangan lahan oleh Pemerintah Kab. Lebak sehingga tidak dapat dilintasi kendaraan.

12. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, efisiensi dari elanja perjalanan dinas sudah mencukupi.
13. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, efisiensi dari elanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, terdapat juga sisa kontrak dari paket pekerjaan dan anggaran tidak digunakan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, karena menggunakan kendaraan dinas karena Sudah terpenuhi.
14. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, efisiensi dari 28 paket pekerjaan, dan anggaran yang tidak digunakan dari paket pekerjaan Pekerjaan perbaikan rumah tidak layak huni Kel. Gaga, Kec. Larangan Kota, Kota Tangerang, dikarenakan gagal lelang.
15. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, efisiensi dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya, selain itu terdapat anggaran yang tidak digunakan dari paket pekerjaan:
 - 1) JL. WR. SUPRATMAN GG. H. SUIH RT. 006/011, KEL. RENGAS, KEC. CIPUTAT TIMUR, KOTA TANGERANG SELATAN tidak dapat dilaksanakan/ gagal kontrak karena lokasi tersebut sudah dibangun oleh pemerintah kab/ kota Tangerang Selatan
 - 2) Kp. Mengger, Ds. Banjar, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang tidak dapat dilaksanakan/ gagal kontrak karena tidak ada lokasi
 - 3) Ds. Bulakan, Kec. Gunung Kencana, Kab. Lebak tidak dapat dilaksanakan/ gagal kontrak karena lokasi tersebut sudah dibangun oleh pemerintah Kab Lebak
 - 4) Kp. Pancur Cempaka, Ds. Pondok Kahuru, Kec. Ciomas, Kab. Serang tidak dapat dilaksanakan/ gagal kontrak karena tidak ada lokasi
16. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, efisiensi dari Belanja Jasa Tenaga



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Tenaga Operator WTP Sindang Heula, Honor Kebersihan dan keamanan diberikan 2 bulan, dikarenakan sudah mencukupi, Belanja Tagihan Listrik, Tagihan listrik tidak digunakan, dikarenakan Pekerjaan Pembangunan WTP Sindang Heula fisiknya selesai pada akhir tahun anggaran 2022, selain itu terdapat anggaran yang tidak digunakan Pekerjaan Kajian Jaringan Utilitas pada Distribusi Air SPAM Sindang Heula Kab. Serang, Kota Serang, dibatalkan karena waktunya tidak mencukupi
17. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional tidak dilaksanakan, dikarenakan terkendala kesiapan lokasi lahan.
 18. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, efisiensi dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat, selain itu terdapat sisa kontrak dari paket pekerjaan updating data base sanitasi
 19. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, efisiensi dari Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Selain itu terdapat anggaran yang tidak digunakan yaitu :
 - 1) Pekerjaan Masterplan Rumah Sakit Yustisial Kejati tidak dilaksanakan dikarenakan pagu anggaran tidak mencukupi
 - 2) Pekerjaan FS Kantor Badan Penghubung di IKN tidak dilaksanakan dikarenakan waktu yang tidak mencukupi
 - 3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitek-Jasa Arsitektur Lainnya dikarenakan Overlap pada kode rekening 5.1.02.02.08.0018
 - 4) Kegiatan Tata cara Implementasi Pergub Lisensi Arsitek belum dapat dilaksanakan, dikarenakan Pergubnya belum tersusun
 - 5) Kegiatan penyusunan sistem online lisensi arsitek tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktunya tidak mencukupi
 20. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, efisiensi dari anggaran pada Belanja Jasa Konsultansi Fasilitator Administrasi (2 org X 2 bln), selain itu terdapat anggaran tidak



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

digunakan, Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi Banten Desa Cireundeu, Kec. Cilograng, Kab. Lebak, putus kontrak dikarenakan lokasinya tidak memungkinkan untuk dilaksanagn pembangunan fisik (terlalu extrim).

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 64 Orang. Data pegawai (PNS) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.40

Data Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Org)
Sekolah Dasar (SD)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	5
Sarjana Muda	6
Diploma IV	0
Sarjana Strata -1	25
Sarjana Strata -2	28
JUMLAH	64 Orang

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa, sekitar 91,17% personil PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten didominasi oleh personil yang berbasis pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Untuk menghadapi tantangan kedepan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi terus melakukan upaya pembinaan pegawai melalui kursus-kursus, diklat-diklat teknis, serta kesempatan belajar program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah. Kesemuanya ini dilakukan dalam upaya peningkatan profesionalisme sumber daya manusia khususnya bidang Perumahan dan Permukiman. Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.8

Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang kepangkatan/Golongan.

Pangkat/ Golongan	Jumlah (Org)
Pembina/ Gol. IV	10
Penata/ Gol. III	48
Pengatur/ Gol. II	6
Juru/ Gol. I	0
JUMLAH	64 Orang



- c. Sarana dan Prasarana Penunjang
- Sarana dan prasarana penunjang di Inspektorat Daerah Provinsi Banten telah cukup memadai. Untuk efisiensi penggunaan sarana dan prasarana penunjang, Inspektorat telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
- a. Sarana dan prasarana penunjang di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah cukup memadai. Untuk efisiensi penggunaan sarana dan prasarana penunjang, Inspektorat telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
 - b. Alat tulis kantor penggunaannya disesuaikan kebutuhan;
 - c. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin;
 - d. Pemeliharaan laptop/komputer dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pemeliharaan bangunan kantor dilakukan pemeliharaan rutin berkala.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdiri atas 3 Sasaran yaitu :

- I. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	ANALISIS
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	81,00%	74,09%	Target belum tercapai	2 indikator kinerja program yang tidak mencapai target, dikarenakan pengadan barang dilaksanakan pada perubahan anggaran sehigga waktu pelaksanaan tidak mencukupi serta diklat yang tidak diikuti oleh ASN

Capaian kinerja sasaran startegis Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan indikator capaaain SAKIP OPD tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, dikarenakan kurangnya diklat teknis yang diikuti oleh ASN dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, selain itu adanya pengadaan yang tidak dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan hanya 2 bulan (perubahan).

Sasaran startegis dengan indikator indikator capaaain SAKIP OPD didukung dengan program dan kegiatan seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program/kegiatan/Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Kinerja			Keterangan	Analisis
			Target	Realisasi	Satun		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100	100	Persen		
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100	82,61	Persen		
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	83,33	Persen		
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	100	Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100	100	Persen		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	13	Dokumen		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	20	Dokumen		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20	20	Dokumen		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20	20	Dokumen		
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20	20	Dokumen		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	11	Dokumen		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	Dokumen		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100	100	Persen		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	Dokumen		
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	Dokumen		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100	100	Persen		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	Bulan		
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Tahun Anggaran		
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	10	Tahun Anggaran		
4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	Tahun Anggaran		
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	Bulan		
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	1	1	Paket		
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	Tahun Anggaran		
8	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	Kegiatan		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	4	3	Persen		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	3	Unit		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19	16	Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	12	12	Persen		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	4	4	Persen		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17	17	Unit		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48	48	Unit		
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	288	273	Unit		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	Gedung		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	Gedung		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	83,33	Persen		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	57	57	Dokumen		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	2	Stel		
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	4	Dokumen		
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3	1	0	Dokumen		
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	1	Dokumen		
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	3	Dokumen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	20	20	Persen		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	Bulan		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	Bulan		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	3	Dokumen		
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	Dokumen		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Dokumen		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	1	1	Bulan		
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	Dokumen		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

II. Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	ANALISIS
1	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Persentase Rumah Layak Huni	88,66%	76,14%	Tidak mencapai target	Data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Desember Tahun 2022
		Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	375,29 Ha	391,60 Ha	Melebihi target	Capaian kinerja tercapai didukung dengan kolaborasi program kab/kota
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	20%	0%	Belum mencapai target	Capaian kinerja belum tercapai, dikarenakan terkendala kesiapan lokasi

Capaian kinerja sasaran terdapat 4 indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase rumah layak huni dapat melebihi target yang ditetapkan, karena didukung dengan program dan kegiatan seperti dibawah ini :

Program/kegiatan/Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output	Kinerja			Keterangan	Analisis
			Target	Realisasi	Satun		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban	88,66	33,27	Persen	Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran, sesuai kewenangannya yaitu rumah layak huni bagi koban bencana dan relokasi korban provinsi	Capaian kinerja tidak tercapai dikarenakan adanya kesalahan dalam perencanaan yaitu terdapat item barang yang belum teralokasikan
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi	100	100	Persen		
1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	3	3	Dokumen		
2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3	3	Dokumen		
3	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	3	3	Dokumen		
4	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	3	3	Dokumen		
5	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	3	3	Dokumen		
6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	3	3	Dokumen		
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	1	1	Persen		
1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kegiatan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1	1	Dokumen		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provins	106	49	Persen		
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Unit Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	91	34	Unit		
2	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dokumen Kajian Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	15	15	Dokumen		
3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Tersedianya Unit Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3	3	M2		
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi	1	1	Persen		
1	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	1	1	Dokumen		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Capaian penyediaan perumahan dan PSU Permukiman (satuan : %)	33,33	33,27	Persen	Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran secara tidak langsung karena program ini sebagai penunjang perumahan	Capaian kinerja tercapai didukung dengan kolaborasi program kab/kota
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			2413	103,56	Persen		
1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersusunnya Dokumen Perenncaanaan Penyediaan PSU Permukiman	5	5	Dokumen		
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjangi Fungsi Hunian	2413	2409	M2		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1	1			

2. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani dapat melebihi target yang ditetapkan, karena didukung dengan program dan kegiatan seperti dibawah ini :

Program/kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Kinerja			Keterangan	Analisis
		Target	Realisasi	Satun		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan : Hektar)	375,29	391,6	Persen	Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran	Capaian kinerja tercapai didukung dengan kolaborasi program kab/kota
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	4	4	Persen		
1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	1	1	Kegiatan	
2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	1	Kegiatan	
3	Penyusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Terlaksananya Penyusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP	1	1	Kegiatan	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	Kegiatan	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	375,79	391,6	Persen		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	227	219	Dokumen		
2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	100,14	100,14	Dokumen		
3	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	6	6	Dokumen		
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	29	29	Dokumen		

3. Cakupan pelayanan pengelolaan sampah dapat melebihi target yang ditetapkan, karena didukung dengan program dan kegiatan seperti dibawah ini :

Program/kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Kinerja			Keterangan	Analisis
		Target	Realisasi	Satun		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	20,00	0,00	Persen	Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran	Capaian kinerja belum tercapai, dikarenakan terkendala kesiapan lokasi
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	100	0	Persen		

III. Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	ANALISIS
1	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	100%	100%	Target belum tercapai	Capaian kinerja tercapai didukung dengan pelaksanaan pemeliharaan di Kawasan banten lama, kawasan pusat pemerintahan provinsi banten dan kawasan sport centre



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Capaian kinerja sasaran dengan indicator Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi telah mencapai target yang ditetpkan, karena didukung program dan kegiatan seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Program/kegiatan/Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output	Kinerja			Keterangan	Analisis
			Target	Realisasi	Satun		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan : %)	100	100	Persen	Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran	Capaian kinerja tercapai didukung dengan pelaksanaan pemeliharaan di Kawasan banten lama, kawasan pusat pemerintahan provinsi banten dan kawasan sport centre
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi	100	100	Persen		
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	9	9	Gedung		
		Jumlah Pengawasan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7	7	Dokumen		
		Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2759	2759	M2		
		Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	11	11	Dokumen		
2	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provins	8	8	Gedung		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan : %)	100	93,75	Persen	Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran	Capaian kinerja tercapai didukung dengan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungannya melalui program dan kegiatan
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	100	93,75	Persen		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18	18	Dokumen		
		Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2439	2439	M2		
2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	6	6	Dokumen		
3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	5	4	Kawasan		
4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2	2	Kawasan		

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 pada Belanja Operasi sebesar Rp. 658.867.228.385,00 atau 96,42% dari pagu anggaran sebesar



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rp. 683.319.161.254,00. Realisasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 358.968.490.879,00 atau 96,32% dari pagu anggaran sebesar Rp. 372.672.075.140,00. Sedangkan total realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 1.007.835.719.264,00 atau 96,39% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.055.991.236.394,00.

Tabel 3.9
Target dan realisasi Belanja Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	6
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000,00	110.541.600,00	147,39
4.1.02	Retribusi Daerah	75.000.000,00	110.187.200,00	146,92
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	75.000.000,00	110.541.600,00	147,39
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	683.319.161.254,00	658.867.228.385,00	96,42
5.2	BELANJA MODAL	372.672.075.140,00	358.968.490.879,00	96,32
		1.055.991.236.394,00	1.017.835.719.264,00	96,39

Sedangkan untuk target dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan dapat digambarkan pada table dibawah ini :

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO.			PROGRAM	BELANJA		
				ANGGARAN	REALISASI	%
			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000	110.541.600	147,39
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	621.046.580.218,00	601.916.464.407,00	96,92
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.540.329.018,00	28.720.494.348,00	88,26
	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.993.000.000,00	1.847.790.693,00	92,71
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.185.000.000,00	1.132.497.629,00	95,57
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000.000,00	441.888.064,00	88,38
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000,00	225.405.000,00	86,69
	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.170.309.000,00	16.048.623.186,00	93,47
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.447.309.000,00	14.759.685.186,00	95,55
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.100.000.000,00	768.260.000,00	69,84
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	488.000.000,00	386.338.000,00	79,17
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	9.985.000,00	99,85
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	100.000.000,00	99.355.000,00	99,36



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000,00	136.360.000,00	90,91
	15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000,00	54.900.000,00	91,50
	16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	90.000.000,00	81.460.000,00	90,51
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	405.000.000,00	359.979.630,00	88,88
	17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	162.478.000,00	157.340.000,00	96,84
	19	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000,00	39.000.000,00	70,91
	20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000,00	-	#VALUE!
	21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	13.850.000,00	92,33
	22	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	130.022.000,00	114.789.630,00	88,28
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.334.359.018,00	3.155.375.235,00	94,63
	23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	453.000.000,00	404.593.819,00	89,31
	24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.000.000,00	137.065.997,00	67,85
	25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000,00	83.422.000,00	92,69
	26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	90.000.000,00	88.532.618,00	98,37
	27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	628.500.000,00	623.766.551,00	99,25
	28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.000.000,00	184.433.000,00	99,69
	29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
	30	Penyediaan Bahan/Material	1.615.859.018,00	1.563.561.250,00	96,76
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.554.000.000,00	1.521.825.000,00	42,82
	31	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.130.328.000,00	1.361.200.000,00	43,48
	32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	423.672.000,00	160.625.000,00	37,91
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.973.000.000,00	3.833.477.604,00	96,49
	33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.973.000.000,00	3.833.477.604,00	96,49
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.960.661.000,00	1.817.063.000,00	92,68
	34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	148.773.200,00	74,39
	35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	760.661.000,00	736.708.100,00	96,85
	36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00	234.190.900,00	78,06
	37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	398.302.200,00	99,58
	38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000,00	299.088.600,00	99,70
2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	13.503.101.800,00	10.457.798.830,00	77,45
9		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.068.675.500,00	1.868.983.500,00	90,35
	39	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	346.120.000,00	298.778.000,00	86,32
	40	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	344.135.500,00	311.671.500,00	90,57
	41	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	345.180.000,00	310.416.000,00	89,93
	42	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	344.440.000,00	315.986.000,00	91,74
	43	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	344.280.000,00	319.276.000,00	92,74
	44	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	344.520.000,00	312.856.000,00	90,81
10		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000,00	276.840.000,00	92,28
	45	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	300.000.000,00	276.840.000,00	92,28
11		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	10.934.426.300,00	8.227.685.330,00	75,25
	46	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.150.000.000,00	867.004.000,00	75,39
	47	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	9.150.000.000,00	6.748.315.030,00	73,75
	48	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	634.426.300,00	612.366.300,00	96,52



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	12		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	200.000.000,00	84.290.000,00	42,15
		49	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	200.000.000,00	84.290.000,00	42,15
3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	61.349.139.900,00	58.381.138.526,00	95,16
	13		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.125.000.000,00	1.721.118.230,00	80,99
		50	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	700.000.000,00	612.345.145,00	87,48
		51	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	300.000.000,00	142.379.000,00	47,46
		52	Penyusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP	525.000.000,00	387.506.325,00	73,81
		53	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	600.000.000,00	578.887.760,00	96,48
	14		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	59.224.139.900,00	56.660.020.296,00	95,67
		54	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	13.245.000.000,00	12.192.168.008,00	92,05
		55	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	41.966.290.000,00	40.599.858.077,00	96,74
		56	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.365.000.000,00	1.256.519.475,00	92,05
		57	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.647.849.900,00	2.611.474.736,00	98,63
4			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	513.654.009.500,00	504.357.032.703,00	98,19
	15		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	513.654.009.500,00	504.357.032.703,00	98,19
		58	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	470.369.960.000,00	462.402.827.303,00	98,31
		0	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	40.832.931.000,00	39.642.106.900,00	97,08
		60	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2.451.118.500,00	2.312.098.500,00	94,33
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	434.944.656.176,00	415.780.317.357,00	95,59
5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	23.207.007.200,00	22.091.560.173,00	95,19
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	23.207.007.200,00	22.091.560.173,00	95,19
	16	61	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	21.611.647.200,00	20.795.680.283,00	96,22
		67	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	650.000.000,00	351.972.390,00	54,15
		62	Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM	945.360.000,00	943.907.500,00	99,85
6			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	-
	17		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	-
7			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	590.000.000,00	473.991.260,00	80,34
	18		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	590.000.000,00	473.991.260,00	80,34
		65	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	50.000.000,00	49.248.000,00	98,50
		66	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	540.000.000,00	424.743.260,00	78,66
8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	381.522.588.407,00	365.234.644.578,00	95,73
	19		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	381.522.588.407,00	365.234.644.578,00	95,73



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		67	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	369.228.482.803,00	355.525.174.443,00	96,29
		68	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	12.294.105.604,00	9.709.470.135,00	78,98
9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	29.625.060.569,00	27.980.121.346,00	94,45
	20		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	29.625.060.569,00	27.980.121.346,00	94,45
		69	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.559.779.200,00	10.077.745.719,00	95,44
		70	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	654.124.189,00	497.634.284,00	76,08
		71	Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.349.357.576,00	2.648.654.378,00	79,08
		72	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	15.061.799.604,00	14.756.086.965,00	97,97
				1.055.916.236.394	1.017.586.240.164	

Secara umum penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2022 cukup tinggi, dengan prosentase 96,35%. Sisa anggaran sebesar 3,62% merupakan efesiensi dari sisa belanja namun anggaran kegiatan sudah tercukupi, selain itu terdapat juga sisa kontrak dari beberapa pekerjaan dan terdapat pula pekerjaan yang tidak dapat dilaksanaka dikarenakan waktu yang tidak mencukupi. Namun secara fisik, seluruh kegiatan telah terlaksana 100% dengan efektif dan efesien.

Bab IV

Penutup

Dari uraian permasalahan dan program pembangunan urusan perumahan dan Kawasan permukiman, serta pekerjaan umum di Banten, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan bidang luasan permukiman kumuh yang telah ditangani melebihi target yaitu 104,60% karena adanya kolaborasi program antara pemerintah pusat melalui Program KOTAKU, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, capaian pelayanan pengelolaan sampah 0% belum sesuai target karena terkendala kesiapan lokasi dan provinsi belum memiliki RISPAH sampai dengan tahun 2022.

Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2022 sesuai target ideal berdasarkan SDGs diperlukan pendanaan yang sangat besar. Selain itu permasalahan perumahan dan permukiman tidak cukup hanya diselesaikan melalui program dan kegiatan dengan pembangunan infrastrukturnya, namun perlu didukung dengan manajemen konservasi lingkungan untuk mempertahankan sumber daya alam melalui penataan ruang secara komprehensif.

Untuk selanjutnya LKIP ini juga merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Provinsi Banten, merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Provinsi Banten di tahun berikutnya. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kesimpulan capaian tujuan, sasaran dan indikator dari Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Provinsi Banten tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional, dengan indikator:
 - 1) Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani, didukung oleh 1 (satu) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu Program Kawasan Permukiman
 - 2) Persentase Rumah Layak Huni, didukung oleh 2 (dua) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu Program Pengembangan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan Dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- 3) Cakupan pelayanan pengelolaan sampah, 1 (satu) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
2. Sasaran Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas dengan indicator kinerja Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi didukung oleh 2 (dua) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu Program Penataan Bangunan Gedung Dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.
3. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien dengan indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD, target yang harus dicapai 81% sedangkan realisasi 74,09% atau tercapai 91,47% termasuk kategori Baik
Realisasi sasaran meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif didukung oleh 1 (satu) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkim di tahun mendatang, adalah :

1. Akan lebih cermat dalam menganggarkan suatu item pekerjaan dengan memperhatikan lokasi dan waktu pelaksanaan pekerjaan
2. Akan dilaksanakan pelatihan bagi tukang sebagai pemasangan RISHA dengan melibatkan dari Ditjen Bina Teknik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RI
3. Penyediaan Panel RISHA sebagai stok barang tersedia apabila terjadi bencana
4. Melakukan validasi dan verifikasi data kawasan kumuh sebelum dimuat dalam peraturan walikota/Bupati yang dilaksanakan bersama-sama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Prioritas penanganan dengan tingkat kekumuhan yaitu kumuh berat yang terlebih dahulu ditangani
6. Pembangunan Rusunawa
7. Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana prasarana di Kawasan permukiman
8. Sosialisasi kepada masyarakat di Kawasan rawan bencana dengan melakukan bimbingan teknis terkait pembangunan rumah yang aman terhadap bencana



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

9. Urusan bidang kecipatakaryaan dan penyelenggaraan bangunan Gedung stretgis serta bangunan dan lingkungannya tahun 2023 kewenangannya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten

Semoga LKIP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LKIP ini sangat diharapkan untuk peneyempurnaan pada masa mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUCHAMAD RACHMAT ROGianto, ST, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

Jabatan : GUBERNUR BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, JANUARI 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

MUCHAMAD RACHMAT ROGianto, ST, MT
NIP: 197107202002121004

SATUAN KERJA : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

DPA TA-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Hektar	375,29
		Persentase Rumah Layak Huni	%	88,66
		Cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	80
2	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	100
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1 03 4 1 2	Retribusi Daerah	72.000.000,00
		75.000.000,00
Total Jumlah Pendapatan : Rp.		72.000.000,00

BELANJA

Urusan / Program		Anggaran
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	471.945.000.000,00
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.500.000.000,00
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	300.000.000,00
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.920.000.000,00
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	406.425.000.000,00
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	51.800.000.000,00
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	444.095.161.000
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.480.161.000,00
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	13.400.000.000,00
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	56.965.000.000,00
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	345.250.000.000,00

Total Jumlah Anggaran : Rp. 916.040.161.000,00

GUBERNUR

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 197107202002121004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AL MUKTABAR

Jabatan : Pj. GUBERNUR BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AL MUKTABAR

SERANG, OKTOBER 2022

Pihak Pertama,

MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Hektar	375,29
		Persentase Rumah Layak Huni	%	88,66
		cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	80
2	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	100
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.03.4.1.2 Retribusi Daerah

72.000.000,00

75.000.000,00

Total Jumlah Pendapatan : Rp.

72.000.000,00

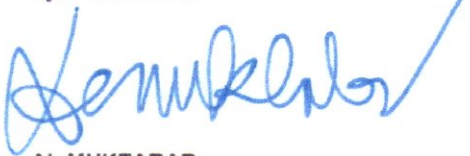
BELANJA

	Urusan / Program	Anggaran
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	434.944.656.176,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	23.207.007.200,00
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	590.000.000,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	381.522.588.407,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN	29.625.060.569,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	621.046.580.218
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.540.329.018,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	13.503.101.800,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	61.349.139.900,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	513.654.009.500,00

Total Jumlah Anggaran : Rp.

1.055.991.236.394,00

Pj. GUBERNUR



AL MUKTABAR

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten



MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, Maret 2023

Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700320 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Tel. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041 Palima- Serang

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Inspektorat Dearah, telah disepakati hasil evaluasi yang dilakukan secara terbatas terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar **80,95 Kategori A (Memuaskan)** yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan kriteria terhadap 4 (empat) komponen dan 12 (dua belas) sub komponen, sebagai berikut :

No.	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Kinerja	30		23,1
	a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	A	5,4
	b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	BB	7,2
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	B	10,5
2.	Pengukuran Kinerja	30		24,6
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	A	5,4
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	BB	7,2
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	BB	12
3.	Pelaporan Kinerja	15		12,75
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	A	2,7
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya	4,50	A	4,05

No.	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	2	3	4	5
	perbaikan/ penyempurnaannya			
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		20,5
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	A	4,5
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6
	c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100		80,95

Hasil penilaian pemenuhan kriteria pada komponen dan sub komponen yang telah dilaksanakan terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. PERENCANAAN KINERJA

a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kondisi dari sub komponen ini adalah kelengkapan dokumen perencanaan kinerja telah dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
- 3) Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
- 4) Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- 5) Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- 7) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- 8) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- 9) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Namun terdapat kondisi yang mengharuskan Perangkat Daerah untuk merubah Rencana Strategis menyesuaikan dengan perubahan RPJMD. Hal tersebut

mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum dapat terpenuhi.

- b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)**

Kualitas dari dokumen perencanaan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Telah diformalkan;
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
- c. Menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai;
- d. Sasaran kinerja perangkat daerah pada prinsipnya telah berorientasi hasil;
- e. Menggambarkan hubungan kinerja dan keterkaitan aktivitas antar bidang atau unit terkait melalui program yang dilaksanakan bersama, yaitu:
 - 1) Program penyelenggaraan pengawasan;
 - 2) Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
- f. Tidak terdapat perubahan pada indikator kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode perencanaan strategis 2017-2022 meskipun terjadi Perubahan Rencana Strategis di Tahun 2019.

Namun Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai yaitu Target kinerja dalam perjanjian kinerja belum selaras dengan target kinerja yang ada dalam Renja, hal ini terlihat bahwa target pada perjanjian kinerja sebagai berikut:

1. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani dengan target 333.3 Ha
2. Persentase Rumah Layak Huni dengan target 87.50%
3. Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah dengan target 20.00%
4. Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan
5. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD dengan target A
6. strategis Provinsi dengan target 88.00%

sedangkan target dalam dokumen renja adalah sebagai berikut:

1. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani dengan target 375,29 Ha
2. Persentase Rumah Layak Huni dengan target 88.66%
3. Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah dengan target 80%
4. Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi dengan target 100%
5. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD dengan target 85

Pemenuhan kriteria atas kualitas perencanaan kinerja yang baik telah dipenuhi. Dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "BB", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan untuk mencapai perjanjian kinerja

- c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**

Dokumen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah melalui upaya sebagai berikut:

- a) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Setiap penanggungjawab program dan kegiatan telah menyusun perjanjian kinerja yang berisikan perjanjian dalam mewujudkan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- c) Telah disusun rencana aksi atas perjanjian kinerja yang ditetapkan;
- d) Dokumen Perencanaan Kinerja tahun mendatang telah menyajikan upaya perbaikan atas hasil penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mewujudkan hasil kinerja yang lebih baik;

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan perencanaan kinerja telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "BB", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan untuk mencapai perjanjian kinerja.

2. PENGUKURAN KINERJA

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Dokumen pengukuran kinerja telah dipenuhi dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2022 yang dilengkapi dengan definisi operasional sebagai ukuran kinerja secara formal;
- 2) Penetapan SOP berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 600/SK.37a/Perkim-1/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan SAKIP;
- 3) Penetapan mekanisme pengumpulan data kinerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/sa-38a/Perkim-1/20222022 tentang Pengelola Kintja SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum dapat terpenuhi.

b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala sebagai upaya dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien. Upaya yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Data kinerja telah mendukung dalam mengukur capaian kinerja, sebagai berikut:
 - a) Definisi Operasional dalam mengukur indikator kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama;
 - b) Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.
- 2) Sumber data yang digunakan dalam mengukur kinerja telah dilengkapi dengan laporan dari penanggung jawab program dan kegiatan pada masing-masing bagian sesuai dengan perjanjian kinerja.

Pemenuhan kriteria atas kualitas pengukuran kinerja yang baik telah dipenuhi. Namun berpengaruh terhadap pemenuhan kriteria nilai "A" yaitu "jika seluruh

kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir”.

c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

1. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* melalui penyesuaian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja setiap bulan dan triwulan;
2. Laporan capaian kinerja telah menguraikan efesiensi atas penggunaan anggaran;
3. Ukuran ketercapaian kinerja melalui laporan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan telah menguraikan kendala atau hambatan dan solusi kedepan serta kemajuan atas realisasi kinerja sebagai dasar dalam menetapkan strategi dan kebijakan untuk melaksanakan aktivitas pada triwulan selanjutnya;

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan pengukuran kinerja yang baik telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "BB", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam pencapaian IKU yang belum maksimal di akhir perencanaan strategis.

3. PELAPORAN KINERJA

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

dokumen LKjIP telah disusun, diformalkan, direviu dan dipublikasikan secara tepat waktu. Penyusunan LKjIP secara berturut-turut telah dipublikasikan pada periode perencanaan strategis yaitu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

Namun pelaksanaan reviu atas laporan kinerja baru dilaksanakan Tahun 2022, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu "jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir", belum dapat terpenuhi.

b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 telah memenuhi standar dengan memenuhi unsur sebagai berikut :

- 1) Sistematika telah disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014;
- 2) Evaluasi pencapaian Kinerja melalui analisis pengukuran capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan selama periode perencanaan strategis, dengan menyajikan informasi sebagai berikut:
 - a) Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022;
 - b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 3) Upaya perbaikan dan penyesuaian strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan kinerja pada tahun mendatang.

Namun, belum terdapat inovasi yang dikembangkan oleh internal Perangkat Daerah dalam upaya memudahkan dan atau membantu proses penyelenggaraan pelaporan capaian kinerja, seperti sistem informasi pengumpulan data dan capaian kinerja. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan, belum dapat terpenuhi.

c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah menguraikan analisis penyesuaian strategi dan kebijakan sebagai optimalisasi dari pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan pelaporan kinerja yang baik telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "BB", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam pencapaian IKU yang belum maksimal di akhir perencanaan strategis.

4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Pemenuhan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu dilaksanakan melalui evaluasi internal melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja internal berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022. Monitoring dan evaluasi atas capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan telah dilaksanakan pada seluruh bagian secara berkala atau setiap triwulan.

Terhadap kedua proses evaluasi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten baru melaksanakan di Tahun 2022, belum secara konsisten selama periode perencanaan strategis. Sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kriteria nilai "A" yaitu "jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir".

b. Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Evaluasi internal atas akuntabilitas capaian kinerja Perangkat Daerah melalui monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan, namun masih perlu ada upaya peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Tim Kerja Implementasi AKIP yang telah dibentuk, dari hasil evaluasi atas capaian kinerja organisasi dilaksanakan oleh pelaksana di bagian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Belum ada pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang evaluasi AKIP.

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Evaluasi internal atas akuntabilitas capaian kinerja organisasi melalui monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan, namun terdapat hal-hal yang belum optimal sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten;
- b) Belum ada peningkatan implementasi SAKIP yang signifikan dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, hal tersebut lebih disebabkan pada rekomendasi pada tahun sebelumnya sebatas pada pemenuhan dokumen pendukung, belum pada kualitas atas hasil dokumen yang telah disusun;
- c) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian telah dimanfaatkan dalam pemenuhan dokumen penyelenggaraan AKIP seperti dokumen rencana aksi, monitoring dan evaluasi, serta LKjIP, namun belum sepenuhnya berpengaruh terhadap capaian kinerja sasaran.

Dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "BB", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam pencapaian IKU yang belum maksimal di akhir perencanaan strategis.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bagian dari tindak lanjut evaluasi sebelumnya dan dinyatakan selesai serta tidak ada keraguan atas hasil evaluasi yang dilakukan.

Serang, Maret 2023

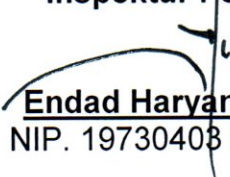
Mengetahui
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Banten


M Rachmat Rogianto, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Tim Penyusun LKIP
Perencana Ahli Muda
Sub Koordinator Program, Evaluasi,
Pelaporan dan Keuangan


Agus Supriyadi, ST, MA
NIP. 197608162008011012

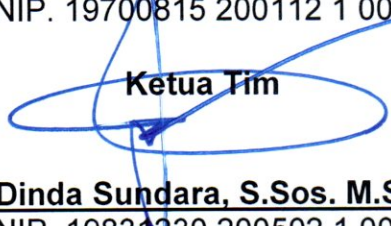
Tim Evaluasi
Inspektorat Daerah Provinsi Banten
Inspektur Pembantu III


Endad Haryanto, SE, M.Si
NIP. 19730408 200112 1 003

Supervisi


Agustia Duha, ST. M.Ak
NIP. 19700815 200112 1 005

Ketua Tim


Dinda Sundara, S.Sos. M.Si
NIP. 19831230 200502 1 001

Anggota


Ira Rohmayanti, S.Sos
NIP. 19820402 200112 2 001